

e-news letter

APR IV 2020

**PKS** PARLEMEN

KREKAWAN, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

# PEMERINTAH TIDAK KONSISTEN

Undang-Undang Sisdiknas  
Masuk Omnibus Law

# RUU Setengah Hati, Sekeras Batu!

Bukankah ide ini baru datang saat pelantikan kabinet, baru enam bulan lalu. Mosok mau mengatur lebih dari 250 juta orang dengan tergesa-gesa, membahas sesuatu yang besar atas nama investasi semata. Itu namanya menyederhakan persoalan, sebagaimana menganggap bahwa tidak akan terpapar Covid 19 karena sering makan keong.

Bagi tukang pahat, bongkahan batu bukanlah sebuah ancaman. Karena baginya itu merupakan awal dari menghasilkan kreasi monumental, bernilai seni tinggi dan berharga. Dalam prosesnya ada peluh, tempaan dan pahatan. Kadang lembut, kadang keras. Sesekali keras sekali, sesekali yang lain lembut sekali bahkan hingga tak terasa. Halus dan mulus. Waktu pahatan tak jarang melewati masa dan usia, namun demikian jika sang pemahat 'mood' nya lagi bagus maka tak perlu melewati umur jagung panen. Secepat kilat, bagai kiriman paket logistik.

Pun dalam pembahasan sebuah Undang-Undang (UU), bisa jadi awalnya adalah 'bongkahan' gagasan, aspirasi

atau bahkan niat tentang kegelisahan publik yang belum teratur. Ruang publik, bukan privat. Maka sudah sepantasnya lebih luas dari ruang personal. Entah itu public eksternal atau internal, yang pasti dilah pemangku kepentingan (stakeholders) sebenarnya. Motif ditarik dari lorong sepi keruang terang. Agar bisa dipreteli dan di 'tempa' oleh berbagai masukan. Hingga pada akhirnya UU tersebut bisa menjadi pemandu jalan (path) yang monumental, bernilai tinggi dan berharga.

Kita sempat terhentak gembira saat Presiden Jokowi di awal Ramadhan (24/4) menunda RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Sebentuk rahmat kebijaksanaan di sepuluh hari pertama bulan

Ramadhan. Namun telusur punya sebab, ternyata hanya satu klaster yang di drop dari RUU Omnibus Law yakni ketenagakerjaan. Buruh protes keras, mereka nekat melakukan demonstrasi ditengah kondisi wabah menurunkan ribuah masa. Bagai batu dihempas dengan sangat keras ke pojok ruangan. Mengalah, namun maju lagi dengan klaster yang lain. Ada sekitar 11 klaster lain yang nampak halus mulus bahkan dengan sangat keras didorong hingga ke meja paripurna. Ibarat lagu, entah apa yang merasukimu. Hingga kau tega mengkhianatiku. Yang tulus mencintaimu.

Tulus meminta dengan halus dan lembut agar pembahas RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibahas dimasa tenang, saat 'mood' kita sudah Kembali normal. Sebagaimana sejumlah analis sampaikan bahwa kita akan menjalani hidup yang benar-benar baru, *new normal*. Bulan Ramadhan cocok loh untuk melatih kesabaran dan menahan hawa nafsu, agar tidak terjebak pada kerugian. Ora kesusu, jangan tergesa-gesa. Kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak biasa, yang sudah mewartakan hampir 200 ribu orang lebih dalam waktu 4 bulan secara global.

Inilah waktunya kita mem-



bangun Indonesia baru, yang new normal. RUU Omnibus Law sesuatu yang baru bagi kita, sejak awal hendak mengkonversi 82 Undang-Undang (UU) dengan 1.194 pasal. *Its new order*. Bukankah ide ini baru datang saat pelantikan kabinet, baru enam bulan lalu. Mosok mau mengatur lebih dari 250 juta orang dengan tergesa-gesa, membahas sesuatu yang besar atas nama investasi semata. Itu namanya menyederhakan persoalan, sebagaimana menganggap bahwa tidak akan terpapar Covid 19 karena sering makan keong. Cukuplah berprilaku satir dan mensimplifikasi urusan.

Tidak perlu semua pahatan harus ditempa dengan keras dan energi yang besar, kadang

kata dan data yang menghujam lebih dari cukup untuk membelalak kesadaran. Tak perlu semua hal harus dengan demonstrasi dan teriakan parau, ini tentang kemauan mengambil masukan yang tidak biasa dalam kondisi yang tidak normal. Kita sedang dalam kondisi *force majeure*, keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari. Jang-jangan sejak awal kita sudah berbeda kamus memahami istilah ini, karena dalam istilah bahasa Prancis, *force majeure* secara harfiah memiliki arti "kekuatan yang lebih besar". Semua pakai rumus Pokoknya...

Humas Fraksi PKS DPR RI

## UU Sisdiknas Masuk Omnibus Law Pemerintah Dinilai Tak Konsisten

Dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020, revisi atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas merupakan undang-undang tersendiri dan merupakan usulan pemerintah. “Keputusan ini disepakati oleh pemerintah sendiri yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM dalam rapat dengan Badan Legislasi DPR RI saat penentuan Prolegnas

### Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

JAKARTA - Sikap pemerintah atas Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja yang merevisi pasal-pasal substantif dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dikritik oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih.

“Pemerintah tidak konsisten! Sebelumnya mereka yang ngotot agar revisi UU Sisdiknas diambil pihaknya, kok malah masuk di Omnibus Law Cipta Kerja,” ujar Fikri dalam

keterangan tertulisnya, Jumat (24/4/2020).

Dia mengungkapkan, setidaknya ada 10 pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang diubah dan dihapus di dalam draf RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR.

“Sebelum bicara pasal apa saja, kita harus konsisten pada kesepakatan awal, bahwa revisi UU Sisdiknas dibahas terpisah,” kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Dia melanjutkan dalam

program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020, revisi atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas merupakan undang-undang tersendiri dan merupakan usulan pemerintah. “Keputusan ini disepakati oleh pemerintah sendiri yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM dalam rapat dengan Badan Legislasi DPR RI saat penentuan Prolegnas,” imbuh Fikri.

Dia merujuk pada kesimpulan hasil rapat antara Baleg DPR RI dengan Menkumham serta pimpinan Panitia Perancangan Undang-Undang (PPUU) DPD RI pada tanggal 16 Januari 2020. Selain itu, dalam rapat-rapat penentuan Prolegnas di Komisi X sebelumnya, Fikri mengungkap bahwa sebenarnya Komisi X DPR RI menginginkan agar revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tetap menjadi usulan DPR.

“Masuk di prolegnas jangka Panjang, tapi tidak prioritas 2020,” katanya.

Namun, kemudian dalam rapat penentuan di Baleg



tersebut pemerintah yang mendesak agar revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tetap masuk di prioritas 2020, dengan pihak pemerintah sebagai pengusul. “Kini, baik RUU Cipta Lapangan Kerja maupun Revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, keduanya merupakan Prolegnas, pembahasan mestinya di masing-masing Panja, jangan tumpang tindih,” tegasnya.

Seperti diketahui, Fraksi PKS DPR sejak awal

menyuarakan penolakan atas RUU Cipta Kerja yang draftnya telah beredar luas dan malah menimbulkan kontroversi. Terakhir, fraksi oposisi ini juga menolak membahas RUU tersebut di Baleg DPR dan beranggapan bahwa tidak tepat DPR dan pemerintah membahas RUU Omnibus Law cipta kerja di saat negara dan masyarakat sedang fokus berjuang melawan pandemi COVID-19.

**Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A**

# Pemerintah Harus Fokus Tangani Covid-19, Bukan Tunda Bahas Klaster Ketenagakerjaan

Mestinya Pemerintah prioritaskan penanganan covid-19, sehingga semestinya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pembahasan keseluruhan RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara menyeluruh, baik klaster ketenagakerjaan maupun 10 klaster lainnya.

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (28/04) — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, mengingatkan sesuai dengan keputusan, Presiden Jokowi jadikan Covid-19 sebagai Bencana Nasional, dan bahwa ada banyak hal yang berpotensi bermasalah dalam RUU Cipta Kerja (RUU Omnibus Law Cipta Kerja), karenanya mestinya tidak hanya klaster ketenagakerjaan saja yang ditunda pembahasannya.

Menurut pria yang akrab disapa HNW, mestinya Pemerintah prioritaskan

penanganan covid-19, sehingga semestinya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pembahasan keseluruhan RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara menyeluruh, baik klaster ketenagakerjaan maupun 10 klaster lainnya.

Yang diminta untuk ditunda pembahasannya oleh Pemerintah dan Pimpinan DPR hanya klaster ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja, itupun setelah mendapat tekanan dari gerakan buruh dan oposisi. Padahal klaster ketenagakerjaan hanya 1 dari 11 klaster lain dalam RUU tersebut yang berpotensi

bermasalah dan kontroversi," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (27/04/2020).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menyebutkan salah satu poin kontroversial dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja diantaranya yakni Pasal 170 yang berpotensi menabrak prinsip negara hukum yg diatur dalam UUD NRI 1945. Pasal tersebut tidak berada di klaster ketenagakerjaan yg sudah diminta untuk ditunda pembahasannya.

"Pasal itu mengatur bahwa peraturan pemerintah (PP) dapat membatalkan Undang-undang (UU). Padahal secara hierarkis, PP yang dibuat oleh pemerintah posisinya berada di bawah UU yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR. Dan secara hukum PP hadir bukan untuk mengubah UU, melainkan untuk menjalankan UU. Demikian ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 5 ayat (2)," ujarnya.

Lebih lanjut, HNW anggota Komisi VIII DPRRI, menuturkan bahwa pemerintah pernah menyebut adanya kesalahan ketik terkait Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yg sempat



munculkan kritik meluas dari publik. Namun sejak diserahkan ke DPR hingga saat ini, ternyata tidak ada penarikan-koreksi/perbaikan sama sekali. Selain itu bila benar telah terjadi salah ketik, kenapa sampai saat ini belum ada pengutusan terkait pelaku salah ketik tersebut.

"Itu hanya salah satu contoh, tetapi sangat prinsipil. Ada banyak lagi hal yang berpotensi bermasalah dan kontroversi di luar klaster ketenagakerjaan, yang oleh Pemerintah sudah diminta untuk ditunda pembahasannya tersebut" tukasnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa sekalipun FPKS sudah memutuskan untuk menolak pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan tidak mengirimkan wakilnya dalam Panja, karena FPKS berpendapat agar Pemerintah dan DPR fokus dan prioritaskan tangani bencana nasional covid-19. Sekalipun demikian FPKS akan terus berjuang agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang bermasalah dan kontroversi tersebut ditarik oleh Pemerintah. Selengkapnya di fraksi.pks.id

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



Marhaban Ya.. *رمضان* 1441 H  
**Ramadhan**

**Membangun Kebersamaan  
untuk Mengatasi Persoalan-  
Persoalan Bangsa**

*Ayo Lebih Baik*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Ketua Fraksi PKS DPR RI :

# Marhaban Yaa Ramadhan! Ramadhan Di Tengah Pandemi, Momentum Solidaritas Nasional

Hari-hari ini layak kita jadikan sebagai hari solidaritas nasional. Karena penanganan Covid-19 butuh kebersamaan, tidak bisa mengandalkan pemerintah saja. Kita ikuti semua protokol kesehatan. Apa yang bisa kita bantu kita bantu dengan semangat gotong royong. Dan memasuki Ramadhan solidaritas nasional harus semakin kuat

## Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (23/4) - Mamasuki Bulan Suci Ramadhan, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, mengucapkan selamat memasuki Ramadhan kepada umat muslim di seluruh Indonesia dan menyampaikan pesan solidaritas nasional karena Ramadhan berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

"Marhaban yaa Ramadhan. Selamat datang bulan Ramadhan. Atas nama pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPR dan DPRD seluruh Indonesia, kami ucapkan kepada seluruh umat Islam

selamat menunaikan ibadah di bulan suci ini. Semoga kita semua memperoleh berkah, rahmat, dan maghfirah dari Allah swt," ungkap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan Ramadhan kali ini berbeda karena dilaksanakan di tengah pandemi coronavirus yang mengharuskan setiap orang menjaga jarak fisik, menjaga kesehatan, hingga melaksanakan ibadah di rumah saja.

Meski demikian, Jazuli berpesan agar umat Islam tetap bisa mengambil hikmah yang besar atas kondisi yang terjadi.

Tetap berpikir positif atau husnudzan, sehingga Ramadhan di tengah pandemi ini bisa menjadi momentum titik balik bagi bangsa Indonesia untuk menghadirkan solidaritas nasional sehingga hadir keberkahan-keberkahan lainnya bagi Indonesia.

"Ibadah Ramadhan kita jangan kendor, justru waktu di rumah yang kita punya lebih banyak. Hidupkan siang malam Ramadhan dengan ibadah berjamaah bersama keluarga. Hadirkan aktivitas yang meratkan ketahanan keluarga dengan lebih banyak berdo'a, tilawah, dan berbagi hikmah atas kondisi yang terjadi dengan sesama keluarga baik secara langsung maupun melalui siaran televisi dan sosial media," saran Anggota DPR Dapil Banten ini.

Tidak kalah penting, lanjut Wakil Presiden Parlemen Muslim Dunia, Ramadhan kali ini harus menjadi momentum untuk semakin menumbuhkan kepedulian dan solidaritas kepada sesama warga bangsa dan negara.

"Hari-hari ini layak kita



jadikan sebagai hari solidaritas nasional. Karena penanganan Covid-19 butuh kebersamaan, tidak bisa mengandalkan pemerintah saja. Kita ikuti semua protokol kesehatan. Apa yang bisa kita bantu kita bantu dengan semangat gotong royong. Dan memasuki Ramadhan solidaritas nasional harus semakin kuat," ungkap Jazuli.

Ketua Fraksi PKS berharap seiring masuknya Ramadhan Allah limpahkan berkah dan rahmat dengan menghilangkan virus corona dari bumi Indonesia. Allahumma amin. "Untuk itu mari saling mendoakan, saling menguatkan, saling menjaga, dan saling membantu sesama," pungkas Jazuli.



Ramadhan Di Tengah Pandemi

# MOMENTUM SOLIDARITAS NASIONAL



“

Penanganan Covid-19 butuh kebersamaan, tidak bisa meng-andalkan pemerintah saja. Kita ikuti semua protokol kesehatan. Apa yang bisa kita bantu kita bantu dengan semangat gotong royong. Dan memasuki Ramadhan solidaritas nasional harus semakin kuat

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

## Jokowi Akhirnya Putuskan Larangan Mudik

# Wakil Ketua Fraksi PKS: Agak Terlambat

Sudah agak terlambat, tapi lebih baik daripada sangat terlambat, karena berdasar data dari Kementerian Perhubungan sudah ada sekitar 900 ribuan warga Jabodetabek yang terlanjur mudik duluan. Ini bukan angka yang kecil. Artinya, potensi penyebaran virus ke daerah-daerah sudah terjadi dengan curi start mudik ini.

## H. SUKAMTA, Ph.D

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (21/04) — Presiden Jokowi, Selasa (21/4) mengeluarkan larangan mudik untuk semua masyarakat pada tahun ini, setelah sebelumnya larangan mudik berlaku hanya untuk PNS, TNI-Polri dan karyawan BUMN.

Sukamta, Wakil Ketua Fraksi PKS, Selasa (21/4) di Jakarta mengajui heran mengenai keputusan pelarangan mudik baru hari ini diputuskan.

"Sudah agak terlambat, tapi lebih baik daripada sangat terlambat, karena berdasar data dari Kementerian Perhubung-

an sudah ada sekitar 900 ribuan warga Jabodetabek yang terlanjur mudik duluan. Ini bukan angka yang kecil. Artinya, potensi penyebaran virus ke daerah-daerah sudah terjadi dengan curi start mudik ini. Kita tahu, ini bukan ranah kebijakan kepala daerah. Mereka hanya bisa mengeluh dan mengantisipasi. Keputusan ada di Pemerintah pusat," pungkasnya.

Sukamta menambahkan pihaknya meminta pemerintah lebih tegas dan komprehensif dalam mengambil keputusan yang berakibat pada nyawa

warga negara.

"Semoga tidak ada ralat lagi dari jubiir Presiden atau Mensesneg. Jangan sampai kita mendengar keputusan yang menceca-menceca, yang diralat bolak-balik," tandas Sukamta.

Anggota Komisi I DPR RI ini menjelaskan bahwa harusnya sejak awal pemerintah sudah memiliki kesiapan dan membuat grand design penanggulangan pandemi Covid-19.

"Kita sudah tahu pola penyebaran Covid 19, baik transmisi import maupun lokal. Pemerintah juga sudah mendapatkan masukan dari berbagai sumber, salah satunya dari lembaga intelijen negara, BIN, yang memprediksikan puncak penyebaran diawali Mei dengan jumlah kasus 95 ribu positif Covid-19 sampai Juli yang mencapai kasus positif sebanyak 106 ribu", urainya.

Semua prediksi, kata Sukamta, sudah dibuat dan kita juga sudah mengalami gelombang penyebaran pertama ketika terjadi arus mudik bulan lalu. Di Jawa dan beberapa daerah lainnya dikenal tradisi ziarah bulan sya'ban atau ruwah



yaitu sebelum bulan Ramadhan yang di Jawa disebut nyadran.

"Kemarin sudah terbukti penularan orang mudik, tanpa sadar membawa virus atau OTG (orang tanpa gejala), membuat acara kumpul-kumpul di kampung halaman dan terjadi penularan. Kasus itu terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Seharusnya pemerintah sejak awal lebih tanggap dengan prediksi-prediksi ini", terang Sukamta.

Apalagi, Sukamta mengutip data Kementerian Perhubungan, masih ada potensi ancaman dari 1.3 juta warga yang akan mudik. Mereka berpotensi menyebar ke beberapa daerah : Jawa Barat 13%, Jawa Tengah-DIY 41%, Jawa Timur 20%, Sumatera Selatan dan Lampung 8%.

"Jumlah 1.3 juta ini bisa menjadi ancaman munculnya daerah episentrum baru

penyebaran Covid-19, apalagi masih banyak yang berpotensi akan mudik ke daerah-daerah yang sudah didatangi oleh 900 ribu orang yang curi start mudik tadi", tegasnya.

Doktor Iulusan University of Salford, Inggris ini menjelaskan bahwa orang dari Jakarta datang ke kampung halaman bisa menjadi media penular atau tertular, itu akan memuncak jumlahnya, kemudian ditambah arus balik yang kemungkinan berpotensi menjadi kasus penularan baru. Jangan lupa juga, kedatangan mahasiswa ke kota-kota besar dengan jumlah kampus banyak seperti DIY, Bandung, Surabaya, Malang, Medan dan Jakarta untuk masuk kuliah tahun ajaran baru sebelum pandemi ini selesai, juga berpotensi menjadi gelombang penyebaran berikutnya.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

Israel Manfaatkan Wabah Covid-19,

# Aleg PKS: Pemerintah dan Negara Islam Jangan Lengah

Pemerintah Indonesia harus mendorong PBB dan negara-negara Islam seperti Qatar, Iran, Turki dan yang lainnya untuk memberi tekanan kepada Israel supaya menghentikan rencana aneksasi lahan Rakyat Palestina di saat wabah covid-19 berlangsung, bahkan selamanya

## KH TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (26/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Toriq Hidayat, menyampaikan bahwa di tengah wabah Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia, Palestina termasuk di antara negara yang tidak mempunyai pilihan kebijakan untuk menghadapi kondisi ekonomi yang terus memburuk dan tekanan dari Israel yang kian kuat.

"Ungkapan bak jatuh terdempa tanga menggambarkan kondisi saudara-saudara kita di Palestina saat wabah covid-19 ini. Tidak seperti negara-negara lainnya yang memberikan

insentif perlindungan finansial untuk mengatasi dampak buruk perekonomian di negaranya. Tampaknya Palestina akan menghadapi dampak wabah ini dengan serentetan masalah yang tidak bisa diramal di masa mendatang", ungkapnya prihatin.

Ketika negara-negara pembela utama Palestina seperti Qatar, Iran dan Turki sedang memfokuskan perhatiannya terhadap isu-isu domestik dalam upaya melawan Covid-19, Koalisi Israel antara Benjamin Netanyahu dan Benny Ganz berencana untuk melakukan

aneksasi alias pengambilan paksa lahan Palestina di Tepi Barat.

Toriq pun mempertanyakan kebijakan Pemimpin Israel ini. Ketika semua orang berlindung di rumahnya di saat wabah Covid-19 berlangsung, bagaimana mungkin Israel dapat membenarkan langkahnya yang terus menghancurkan rumah-rumah warga Palestina. Apalagi hasil survei Deep Knowledge Ventures menunjukkan Israel sebagai negara ter-aman bagi wabah Covid-19. Apakah karena itu kemudian para pemimpin Israel ini menjadi sombong dan hilang rasa kemanusiaannya.

"Dalam kondisi normal saja upaya Israel melakukan aneksasi terhadap lahan Palestina sudah melanggar hukum internasional, apalagi pada saat terjadi pandemi covid-19, tindakan tersebut benar-benar tidak manusiawi. Seperti halnya Israel ingin memanfaatkan kelengahan dunia yang fokus dengan wabah Covid-19, kemudian melakukan aneksasi lahan di Tepi Barat", ungkapnya.

Tokoh ulama Tasikmalaya



ini pun menambahkan dengan tegas, secara kemanusiaan seharusnya warga Palestina dilindungi dari wabah covid-19, Bukannya malah merobohkan rumah dan merampas tanah mereka untuk dibangun pemukiman Yahudi diatas reruntuhanannya.

Oleh sebab itu Anggota Komisi I DPR RI ini meminta Pemerintah Indonesia supaya mendorong negara-negara muslim jangan lengah dari

upaya aneksasi Israel atas lahan rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

"Pemerintah Indonesia harus mendorong PBB dan negara-negara Islam seperti Qatar, Iran, Turki dan yang lainnya untuk memberi tekanan kepada Israel supaya menghentikan rencana aneksasi lahan Rakyat Palestina di saat wabah covid-19 berlangsung, bahkan selamanya", Tegas Toriq.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**Dr. H. Mardani, M.Eng**  
Anggota Komisi II DPR RI

**Mardani Minta  
Ombudsman Optimal  
Melakukan Pengawasan  
Maladministrasi**

*Saya berharap Ombudsman RI tetap optimal melakukan pengawasan terhadap Maladministrasi pada jajaran pemerintahan dan juga ASN untuk menjaga pelayanan publik agar lebih optimal. Ombudsman juga harus serius melakukan pengawasan distribusi dan penggunaan dana Bencana ini agar tepat sasaran tepat guna*



# Mardani Minta Ombudsman Optimal Melakukan Pengawasan Maladministrasi

“Saya berharap Ombudsman RI tetap optimal melakukan pengawasan terhadap Maladministrasi pada jajaran pemerintahan dan juga ASN untuk menjaga pelayanan publik agar lebih optimal

**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (23/04) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera meminta Ombudsman RI tetap optimal melakukan pengawasan Maladministrasi Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kondisi Pandemi Covid 19.

“Saya berharap Ombudsman RI tetap optimal melakukan pengawasan terhadap Maladministrasi pada jajaran pemerintahan dan juga ASN untuk menjaga pelayanan publik agar lebih optimal,” kata Mardani, Rabu (22/04/2020).

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS itu juga minta Ombudsman mengawasi anggaran sebesar Rp 405,1 Triliun penanggulangan dampak wabah Covid 19.

“Ombudsman harus serius melakukan pengawasan distribusi dan penggunaan dana Bencana ini agar tepat sasaran tepat guna,” ujar Mardani Indonesian Corruption Watch (ICW) melansir selama sepuluh tahun terakhir terdapat sedikitnya 87 kasus korupsi dana bencana yang telah ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW mengatakan titik rawan korupsi dana bantuan bencana terletak pada tahapan tanggap darurat, rehabilitasi dan pemulihan atau rekonstruksi lokasi bencana.

Mardani yang juga Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini juga

menghimbau Ombudsman untuk mengawasi titik-titik rawan maladministrasi itu.

“Ombudsman pusat dan perwakilan harus melakukan pengawasan betul titik potensi korupsi dan penyalahgunaan dana bencana ini,” katanya.

Mardani minta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk transparan dan pengelolaannya akuntabel menyalurkan dana penanganan pandemi Covid 19, “harus terbuka jalan kan SOP melakukan pelayanan publik yang lebih baik justru ketika kondisi seperti ini jangan sampai karena laku segelintir orang jadi penyebab makin lama virus ini bertahan,” pungkasnya.



Usulan PKS di Masa Covid 19

# Hampir Semua Diakomodir



“ *Alhamdulillah* usul PKS kepada Pemerintah di masa Covid 19, hampir semuanya diakomodir. Dari mulai mencegah Mudik, Terapkan Karantina Wilayah/PSBB, TVRI sebagai media pembelajaran, menutup *public utility* seperti Bandara dan lainnya. Karena PKS tanpa pamrih, semua ikhlas, tulus serta ridho.

Kami ikhlas ridho dan tulus memberikan *advices* dan kritikan untuk bangsa dan negara tercinta ini, Karena kami ada di oposisi yang tidak mengharapkan pamrih dan kursi jabatan di kabinet maupun BUMN.

---

**DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H.,M.H**

Anggota Fraksi PKS DPR RI

## Dukung Program Asimilasi

# Legislator PKS Sayangkan Minimnya Kontrol terhadap Napi

Bapas seharusnya mengontrol dan mengunjungi rumah napi yang dibebaskan tiap bulannya. Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi napi, kemudian meminta pertanggung jawaban ke pihak penjamin terkait nasib napi setelah melakukan asimilasi dan pembebasan bersyarat.

## H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.

Anggota Komisi III DPR RI

Aceh (22/04) — Sejumlah narapidana diketahui kembali melakukan aksi kriminal setelah dibebaskan atau menerima program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengaku mendukung program asimilasi tersebut. Meskipun demikian, ia menyayangkan lemahnya kontrol terhadap napi yang bebas.

"Jadi saya percaya sepenuhnya kepada Kemenkumham

untuk membebaskan mereka yang sudah waktunya untuk mendapatkan hak ini. Tapi sayangnya kontrol yang sangat minimalis sehingga kemudian terjadilah peristiwa itu," ujar Nasir,

"Seperti kata pepatah gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Jadi gara-gara mungkin belasan orang, ribuan orang itu terkena dampaknya," imbuhnya.

Nasir mengakui ada sebuah dilema dalam kasus ini. Di satu sisi, asimilasi adalah hak para napi yang harus

diberikan, karena mereka telah menjalani dua per tiga masa hukuman. Sementara di sisi yang lain, Badan Pemasarakatan (Bapas) dinilai tidak bekerja maksimal dalam mengontrol napi-napi tersebut.

Dia berpandangan Bapas seharusnya mengontrol dan mengunjungi rumah napi yang dibebaskan tiap bulannya. Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi napi, kemudian meminta pertanggung jawaban ke pihak penjamin terkait nasib napi setelah melakukan asimilasi dan pembebasan bersyarat.

"Tapi mereka kan nggak punya dana untuk melakukan kunjungan itu. Lalu dibuatlah ketentuan napilah yang harus melapor. Oke kalau napi itu dekat dari bapas, kalau jauh bagaimana? Jadi ini tidak dilakukan, kemudian mekanisme atau prosedur ini tidak berjalan dengan baik, sehingga terjadilah kejahatan yang dilakukan napi tersebut," jelasnya.

Nasir juga mengungkap kemungkinan para napi tidak mendapat pelatihan keterampilan



an selama mendekam di lapas.

Nasir juga mengungkap kemungkinan para napi tidak mendapat pelatihan keterampilan selama mendekam di lapas. Sehingga ketika bebas, yang bersangkutan akan kesulitan mencari pekerjaan dan uang serta tergoda melakukan kejahatan karena menganggur.

"Belajar dari kasus-kasus ini, maka Kemenkumham harus mengevaluasi apakah ada oknum-oknumnya yang ikut

bermain dalam memberikan asimilasi ini," kata dia.

"Misalkan napi ini belum saatnya mendapatkan asimilasi tapi karena dia main mata dan ada uang dibalik itu, maka oknum lapas memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan layak mendapat asimilasi. Nah ini harus dievaluasi secara ketat dan diterjunkan orang-orang untuk mengetahui hal tersebut karena memang pekerjaan sulit," tandasnya

# PERINGATI HARI BUMI, ANDI AKMAL TEKANKAN PENTINGNYA JAGA EKOSISTEM SAAT COVID-19



“

Bumi yang menampung limbah ini akan bergejolak keras yang akan mengganggu kehidupan manusia akibat ekosistem yang buruk apabila penanganan sampah medis akibat pasien corona tidak di tangani secara baik. Bahkan pembakaran akan berakibat fatal meskipun berasumsi akan membunuh virus, karena racun akibat pembakaran akan memicu penyakit ganas lainnya

**Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI



Peringati Hari Bumi

# Andi Akmal Tekankan Pentingnya Jaga Ekosistem saat Covid-19

Bumi seolah sedang berpuasa terhadap aktifitas manusia sehingga terjadi perbaikan lingkungan terutama lapisan udara. Berhentinya pabrik, minimalnya jumlah kendaraan yang beroperasi, menjadi pengurangan BBM yang sangat signifikan

**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (22/04) — Sejak temuan infeksi penyakit virus corona atau yang biasa disebut covid-19 berawal bulan Maret 2020 di tanah air, kini memunculkan berbagai persoalan yang sangat kompleks, mulai dari persoalan kesehatan, pangan, energi hingga ekonomi.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, meminta KLHK sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki konsentrasi lebih terhadap pengawasan persoalan limbah medis.

Menurut Akmal, Limbah Medis yang penanganan pasien dengan penyakit corona ini memiliki karakteristik yang

khusus dalam penanganannya. Hal ini dikarenakan virus ini selain mudah sekali menyebar dan menulari orang-orang di muka bumi, hasil penelitian yang telah diterbitkan New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa virus corona bertahan di luar tubuh manusia dalam durasi yang sangat lama cukup untuk menulari manusia.

"Misal virus ini bila berada di atas kardus, akan bertahan hingga 24 jam, sedangkan bila di atas permukaan plastik atau logam stainless, akan bertahan antara dua hingga tiga hari", pungkaskanya.

Politisi PKS ini

mengatakan, selain persoalan yang menjadi ancaman langsung kehidupan manusia, ada persoalan yang secara tidak langsung tapi berujung pada terganggunya kehidupan manusia akibat bumi sebagai tempat berpijak menjadi terganggu. Persoalan yang secara langsung adalah persoalan ekonomi.

"Berawal dari social distancing yang memaksa setiap orang tetap di rumah. Pabrik, kantor, restoran, perhotelan, tempat wisata, sarana transportasi publik, semua terbatas. Semua kegiatan bekerja berbagai sektor terhenti atau berkurang. Begitu juga proses perdagangan, baik dalam kota, antar kota bahkan antar negara. Kurs mata uang bergejolak," terangnya.

Semua gangguan ini, kata Akmal, mengganggu persoalan ekonomi baik keluarga, perusahaan hingga negara. Mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha kelas kakap semua terganggu tidak terkecuali.

"Hanya sedikit usaha yang menjadi meningkat tapi sangat kecil porsinya seperti usaha



pembuatan alat medis termasuk APD dan masker, usaha frozen food, hingga usaha penyedia rapat online," tandasnya.

Akmal menambahkan, setelah ancaman gangguan yang secara langsung menimpa umat manusia, gangguan secara tidak langsung adalah sampah medis yang berasal dari pasien positif corona. Hasil studi di China, yang merupakan

negara pertama terkena wabah ini, menunjukkan penambahan limbah medis yang mencapai hingga 6.066 ton per hari. Pada studi tersebut, penyederhanaan informasinya mengukur bahwa setiap pasien positif corona, menghasilkan limbah medis sebanyak 14,3 kilogram.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)

## Harga Ayam Jatuh Akibat Covid-19

# Slamet: Pemerintah Jangan PHP Kepada Peternak

para peternak rakyat ini adalah rakyat kecil, buruh dan bukan pengusaha besar. Dalam artian, kata dia, tidak cukup ditutupi dari penghematan anggaran di Kementan.”perlu langkah dan kebijakan strategis dalam persoalan ini

### drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (20/04) — Rencana Kementerian Pertanian (Kementan) membeli ayam peternak yang harganya jatuh, imbas wabah Covid-19 mengundang perhatian anggota DPR-RI dari Fraksi PKS, Slamet.

“Pemerintah jangan memberi harapan palsu kepada para peternak mandiri di saat harga ternak jatuh,” ujar Slamet kepada media, Senin (20/4). Menurut dia, sebenarnya persoalan ayam mudah, tidak perlu terjadi jika pemerintah responsif sejak awal.

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sukabumi ini mengatakan, hal ini bisa diatasi jika pemerintah melakukan

pembatasan grand parent stok yg masuk sejak awal. Atau lakukan pemusnahan doc sejak dini.

“Saya punya keyakinan, Kalau ini yg di lakukan pemerintah, insyaallah harga akan terkontrol,” tegasnya.

“Saya mengingatkan pemerintah bisa melakukan hal itu. Sebab pemerintah adalah pemegang otoritas. maka tidak akan terjadi masalah yang berkepanjangan seperti ini,” imbuhnya.

Menurut Slamet, para peternak rakyat ini adalah rakyat kecil, buruh dan bukan pengusaha besar. Dalam artian, kata dia, tidak cukup ditutupi

dari penghematan anggaran di Kementan.”perlu langkah dan kebijakan strategis dalam persoalan ini,” tambahnya.

Menurutnya, dalam rangka menjaga ketahanan pangan Indonesia sudah selayaknya anggaran pertanian ditambah, bukan malah sebaliknya di sunat.

“Pemerintah harus bekerja cepat sebagai langkah yang bijak dan cepat untuk mengantisipasi kebangkrutan usaha para peternak,” lugasnya.

Seperti diketahui, kata Slamet, harga ayam peternak jatuh sampai ke Rp 6000,- per kilogram. Sedangkan harga HPP Rp 17.000,- per kilogram.

Sebelumnya juga, sambutan Slamet, peternak di Jawa Timur membagi-bagikan secara gratis ayam-ayam ternak karena harganya terjun bebas.

Sehingga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan berencana membeli ayam milik para peternak mandiri di Pulau Jawa karena harga jatuh akibat Covid-19 atau Corona.



# Pemerintah Perlu Pikirkan Optimalisasi Konsumsi Daging Ayamutamakan Peternak

Menutup celah impor daging sapi dan kerbau menjadi kebijakan penting sehingga masyarakat dapat mulai tereduksi bahwa ketika tidak ada daging sapi, masih ada daging ayam yang harganya wajar

## **Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta, (25/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Asal Wongiri, Hamid Noor Yasin Meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dan Bulog untuk mengembangkan potensi daging ayam sebagai alternatif pengganti sementara pemenuhan kekurangan daging sapi atau Kerbau.

Sebelumnya, kata Hamid, pemerintah melalui Kementan dan Bulog sedang mengembangkan stok alternatif dari makanan pokok beras di masa wabah covid-19 ini berupa sagu, jagung atau singkong.

"Saat ini Peternak Ayam sedang dalam kondisi yang sangat kritis pada kelangsungan proses usahanya. Keadaan ini sebenarnya sudah berlang-

sung sejak 2018 atau sekitar dua tahun dimana harga ayam hidup (livebird) terus anjlok. Bahkan, harganya berada di level Rp 5.000-10.000/kg. Ini jelas sudah tidak masuk akal pada proses dunia usaha yang modalnya berupa pakan dan segala perawatan dibanding hasil panennya", jelas Hamid.

Politisi PKS ini membandingkan pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 7 tahun 2020, harga ayam di tingkat peternak seharusnya berada di level Rp 19.000-21.000/kg. Dengan harga di tingkat peternak yang rerata sampe Rp.7.000,-, telah memicu para peternak melepaskan ayam-ayamnya agar mencari makan sendiri karena para peternak ini sudah tidak sanggup memberi makan

hewan ternaknya.

Menyelamatkan para peternak ayam yang secara bersamaan juga memenuhi kebutuhan daging di tengah masyarakat yang menambal kekurangan stok daging sapi atau kerbau, menurut Hamid akan menjadi kebijakan yang akan menjadi penyelamat para peternak.

"Menutup celah impor daging sapi dan kerbau menjadi kebijakan penting sehingga masyarakat dapat mulai tereduksi bahwa ketika tidak ada daging sapi, masih ada daging ayam yang harganya wajar", pungkasnya.

"Pemerintah saat ini sangat urgen untuk menyelamatkan peternak ayam ini. Solusi jangka pendek adalah jangan ada impor daging dari luar, dan bantu para peternak untuk dapat pakan yang masuk akal. Mereka menyerah bukan hanya ayamnya tidak terasap, tapi terlalu murah dibandingkan dengan biaya produksi berupa pakan yang tinggi", imbuh Hamid.

Legislator PKS dari Jateng IV ini mengatakan bahwa pemerintah yang telah bekerjasama dengan 15 perusahaan yang bersedia menyerap ayam peternak masing-masing



sebanyak 4 juta ekor ayam masih belum merata pemenuhan semua kebutuhan para peternak terutama di daerah-daerah. Saat ini sudah banyak kebangkrutan usaha peternak ayam pada skala UMKM yang merupakan gambaran adanya PHK para pekerja-pekerjanya.

"Saya berharap refocusing anggaran kementerian bekerjasama pemda-pemda

mampu membuat terobosan penyelamatan para peternak ayam ini. Kementerian Pertanian perlu berkoordinasi dengan kementerian Perdagangan untuk mempertimbangkan pembatasan impor daging yang akan membantu meningkatkan permintaan daging ayam sebagai pemenuhan kekurangan daging sapi atau kerbau sebagai alternatif", tutup Hamid.

# Aleg PKS Minta Anggaran Refocusing KKP untuk Covid-19, Mesti Segera Direalisasikan

dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, agar KKP tetap menjaga kontribusi untuk ekonomi dalam negeri. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara menjaga neraca perdagangan perikanan Indonesia dan menjaga stabilitas kinerja produksi perikanan dan PDB perikanan, serta antisipasi praktek illegal fishing di saat wabah Covid-19 ini

## H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (22/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyampaikan bahwa saat ini pandemik Covid-19 semakin mengkhawatirkan dan karena itu semua kegiatan dari refocusing anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mesti disegerakan pelaksanaannya dan dipermudah prosesnya, jangan birokratis dan administratif.

"karena kondisi kita saat ini dalam kondisi darurat Kesehatan jadi harus segera didistribusikan peruntukannya", ujar Johan pada saat mengikuti

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan secara virtual pada hari Rabu, (22/04/2020).

Dalam Rapat tersebut, membahas dan menyepakati realokasi anggaran KKP dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19 dari sektor kelautan dan perikanan.

Legislator dari dipil NTB 1 ini menjelaskan bahwa penyesuaian pagu KKP yang semula Rp 6,4 Triliun menjadi Rp 4,6 Triliun mesti difokuskan untuk menjaga dan melindungi ketahanan diri (imunitas) dari

para nelayan kita.

"Sebab jika banyak wilayah pusat produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya telah terpapar Covid-19 maka akan mengganggu atau mengurangi produksi ikan dan produk kelautan lainnya," papar Johan.

Politikus dari PKS ini mengusulkan agar KKP juga memperhatikan Peningkatan Daya Saing kelautan dan perikanan, karena daya saing berhubungan erat dengan peningkatan ketahanan ekonomi dari para nelayan dan stakeholder kelautan lainnya dalam situasi wabah Covid-19 ini.

Johan juga mencontohkan kegiatan bantuan sarana pengolahan bagi UMKM perikanan perlu ditingkatkan sebagai benteng perekonomian nelayan dalam menghadapi potensi krisis ekonomi ke depan.

Anggota Legislatif dari Pulau Sumbawa ini juga memaparkan bahwa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, agar KKP tetap menjaga kontribusi untuk ekonomi dalam negeri.

"Hal tersebut harus



dilakukan dengan cara menjaga neraca perdagangan perikanan Indonesia dan menjaga stabilitas kinerja produksi perikanan dan PDB perikanan, serta antisipasi praktek illegal fishing di saat wabah Covid-19 ini," papar Johan.

Johan juga menjelaskan agar kegiatan refocusing untuk membantu nelayan supaya lebih tepat sasaran, seperti

bantuan benih ikan, bantuan pakan, bioflok, minapadi, serta sarana pendukung revitalisasi tambak dan lain-lain.

"Sebaiknya diprioritaskan untuk nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan sistem birokrasi yang tidak menyulitkan/membebanikan nelayan di saat sulit karena wabah pandemik ini," tutup Johan.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Marhaban Ya.. *رمضان* 1441 H  
**Ramadhan**

**Membangun Kebersamaan  
untuk Mengatasi Persoalan-  
Persoalan Bangsa**

*Ayo Lebih Baik*



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

RAKYAT BUTUH

# HAL-HAL SUBSTANTIF



“

Agar polemik mengenai istilah mudik dan pulang kampung ini berakhir, saya mendesak agar Pemerintah segera menerbitkan aturan main yang tegas terkait masalah ini. Sekali lagi, pemerintah harus tegas. Jangan terjebak permainan istilah atau semantik. Rakyat butuh hal-hal substantif

**H. Ahmad Syaikhu**

Anggota Komisi V DPR RI

# Anggota Fraksi PKS: Tolong Presiden Jokowi Jangan *Mencla-Mencle* Terkait Mudik

Tidak boleh seperti ini. Larangan mudik sudah telat karena sudah ada sekitar sejuta orang yang kembali ke kampung halaman. Lalu ada lagi kegaduhan soal perbedaan mudik dan pulang kampung. Nyawa rakyat jadi taruhannya

## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Bekasi (23/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Ahmad Syaikhmu meminta Presiden Joko Widodo untuk tegas terkait mudik. Dia juga mengingatkan Jokowi untuk tidak membuat publik gaduh dengan perdebatan istilah.

"Ini harus tegas. Pak Jokowi tidak boleh mencla-mencle begini soal mudik," kata Syaikhmu.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI itu, ketidaktegasan sikap soal mudik akan berdampak sangat mahal. Nyawa rakyat Indonesia menjadi taruhannya.

Memang Presiden Jokowi sudah menyatakan larangan

mudik. Tapi belakangan, publik dibuat gaduh dengan pernyataan ada perbedaan antara mudik dan pulang kampung.

"Tidak boleh seperti ini. Larangan mudik sudah telat karena sudah ada sekitar sejuta orang yang kembali ke kampung halaman. Lalu ada lagi kegaduhan soal perbedaan mudik dan pulang kampung. Nyawa rakyat jadi taruhannya," tegas Syaikhmu.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memutuskan larangan mudik bagi semua warga. Secara khusus Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut

Binsar Pandjaitan mengatakan, larangan mudik ini berlaku untuk seluruh masyarakat berasal dari wilayah zona merah terhitung sejak Jumat, 24 April 2020.

Kebijakan ini melahirkan optimisme baru bahwa pandemi akan segera berakhir di Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bahkan menyatakan pelarangan ini efektif untuk mencegah penularan yang tak terkendali.

IDI memberikan beberapa alasan. Pertama, masyarakat yang terlihat sehat namun ternyata berstatus orang dalam pemantauan (ODP) atau orang tanpa gejala (OTG) berpotensi menularkan.

Kedua, di daerah masyarakatnya sangat gubuy sehingga kadang-kadang satu rumah dihuni beberapa keluarga sehingga sangat beresiko menularkan.

Ketiga, fasilitas kesehatan di daerah juga tidak cukup memadai untuk melakukan penanganan.

Namun, kebijakan tersebut seperti menjadi mentah lagi



Sebab dalam wawancara di acara Mata Najwa, Presiden Jokowi menyatakan bahwa yang dilarang adalah mudik dan bukan pulang kampung.

Menurut Jokowi, sejumlah warga yang telah keluar dari Jabodetabek sejak pandemi ini masuk ke Indonesia tidak dikategorikan sebagai mudik melainkan dianggap sebagai kategori pulang kampung, dan hal ini diperbolehkan. Pernyataan ini menuai polemik di masyarakat mengingat istilah mudik dan pulang kampung selama ini dianggap sebagai hal yg sama.

Namun ternyata, perbedaan mudik dan pulang kampung ini kemudian ditegaskan lagi oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Agus

Wibowo dalam sebuah seminar online bersama Kedai Kopi.

Dijelaskan, perbedaan antara pulang kampung dan mudik di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Yang dilarang pemerintah adalah mudik, tetapi pulang kampung diperbolehkan dengan protokol tertentu. Hal ini membawa arti bahwa harapan IDI akan berkurangnya ODP atau OTG di daerah bisa jadi tidak akan menjadi kenyataan, sebab dengan dilarangnya mudik tapi diperbolehkannya pulang kampung menyebabkan masih adanya kemungkinan OTG yang pulang kampung dan menularkan penyakitnya di daerah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Tidak Pro Rakyat, Aleg PKS Desak Anggaran Covid 19 Direalokasi

Untuk apa beli vitamin c dosis tinggi yang mahal, toh kebutuhan vitamin c yang diperlukan tubuh hanya sekitar 62-90 mg/hari. Apa tidak mubazir dan memboroskan anggaran. Sementara diluar banyak rakyat yang kelaparan, bahkan ada yang meninggal karena tidak makan

## Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (21/04) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sositomomo mendesak anggaran penanganan covid di Kementerian PUPR dan Kemehub direalokasi karena tidak pro rakyat.

Salah satu belanja yang menjadi sorotan adalah anggaran pembelian vitamin untuk imunitas, makanan tambahan dan hingga tunjangan komunikasi dan insentif yang nilainya mencapai ratusan miliar.

"Ada anggaran sebesar Rp 320 miliar di Kemenhub dan Rp 244 miliar di Kementerian PUPR yang dialokasi untuk keperluan penanganan covid. Tapi, sayangnya tidak pro rakyat.

Sebagian besar anggaran itu habis untuk kepentingan dan keselamatan kementerian itu sendiri. Bahkan, ada anggaran untuk pembelian vitamin untuk daya tahan tubuh para staf dan pejabat. Ada juga anggaran makanan tambahan, uang insentif dan tunjangan komunikasi. Ini sangat tidak pantas. Kenapa pembelian vitamin dan makan harus sampai dibebankan ke APBN, sementara diluar banyak rakyat yang kelaparan," kata Sigit Sositomomo, anggota Komisi V dan Banggar dari FPKS DPR RI.

Seperti diketahui, dalam realokasi anggaran Kemenhub tahun 2020 terkait pandemi

covid 19 dianggarkan dana sebesar Rp 320 miliar untuk kegiatan percepatan penanganan covid dilingkungan Kemenhub. Anggaran sebesar itu digunakan untuk pembelian peralatan pengaman diri, makanan dan minuman tambahan untuk petugas piket hingga pembelian penambahan daya tahan tubuh berupa vitamin C 1000 mg dan multivitamin lainnya.

Sementara di Kementerian PUPR, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 244 miliar untuk pembelian penambahan daya tahan tubuh bagi 40 ribu staf kantor dan balai di seluruh Indonesia, desinfectan dan sebagainya.

"Pembelian penambahan daya tahan tubuh berupa vitamin C 1000 mg dan multivitamin itu memboroskan anggaran sekaligus menunjukkan ketidakpedulian terhadap rakyat. Untuk apa beli vitamin c dosis tinggi yang mahal, toh kebutuhan vitamin c yang diperlukan tubuh hanya sekitar 62-90 mg/hari. Apa tidak mubazir dan memboroskan anggaran. Sementara diluar banyak rakyat yang kelaparan, bahkan ada yang meninggal karena tidak makan. Mereka



seharusnya yang lebih diutamakan. Kalau pejabat dan staf kan punya penghasilan dan bisa beli sendiri vitamin. Tidak perlu dibayai APBN," kata Sigit, Anggota DPR RI asal Dapil I Jatim.

Untuk itu, Sigit mendesak Kemenhub dan Kementerian PUPR untuk merealokasi kembali anggaran penanganan covid

yang tidak perlu. Sigit meminta anggaran tersebut dialihkan untuk kepentingan rakyat.

"Batalkan belanja-belanja penanganan covid yang tidak pro rakyat. Dan alihkan semuanya untuk bansos guna membantu rakyat melawan pandemi," kata Sigit.

## Rencana Pemindahan Ibukota Dinilai Kacau

# Aleg PKS: Tidak Perlu Dilanjutkan

Pemerintah seharusnya membatalkan rencana pemindahan IKN ini dan fokus pada penanganan covid19 saat ini beserta dampaknya. Karena dampak ekonominya diperkirakan akan sangat dalam dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk memulihkannya kembali.

### H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (25/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menyoroiti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sebuah acara diskusi dengan pemimpin redaksi secara online, Kamis, (23/04/2020).

Kedua Menteri di Kabinet Jokowi ini membuat pernyataan yang tidak sinkron satu sama lain.

"Selain anggaran infrastruktur dasar proyek ibukota baru, Kementerian PUPR mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk menyiapkan rumah sakit. Dari total anggaran

belanja modal Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp 120 triliun, sebagian sudah dialihkan. Salah satu proyek adalah rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau," pungkas Sri Mulyani.

Sementara Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang disampaikan dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, yang menyatakan bahwa tidak ada satupun kegiatan dalam anggaran infrastruktur untuk IKN pada tahun 2020 karena belum ada payung hukumnya yaitu Undang-Undang IKN, sehingga belum ada pengalokasian.

Akibat ketidaksinkronan

ini, Legislator PKS yang biasa disapa SJP ini menilai bahwa di internal Pemerintah sendiri tidak kompak mengenai rencana pemindahan IKN dan hal tersebut menunjukkan ketidaksiapan Pemerintah mengenai rencana yang sudah dikampanyekan besar-besaran tersebut.

"Kami melihat rencana kerja pemerintah tentang pemindahan ibukota ini cukup kacau, jadi sebaiknya tidak perlu dilanjutkan," ungkapnya.

Menurut Suryadi, jangan sampai bencana ini dijadikan obyek pencitraan oleh Pemerintah, dengan seolah-olah memperlihatkan keberpihakan pada rakyat dengan mengalihkan anggaran proyek mewah tersebut padahal sebenarnya anggaran itu sendiri tidak pernah ada.

Namun, Suryadi menambahkan, yang lebih penting daripada itu, Pemerintah seharusnya membatalkan rencana pemindahan IKN ini dan fokus pada penanganan covid19 saat ini beserta dampaknya. Karena dampak ekonominya diperkirakan akan sangat dalam dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk memulihkannya



kembali.

"Hal ini dibutuhkan untuk memperlihatkan bahwa Pemerintah memiliki sense of crisis terhadap bencana yang sedang dialami oleh Bangsa dan Negara Indonesia," tegasnya.

Sebagaimana diketahui total anggaran pemindahan IKN diperkirakan sebesar 466T, dan dari besaran tersebut sekitar 96T akan menggunakan APBN yang dibagi dalam beberapa tahap mulai dari 2021 hingga 2024.

Artinya setiap tahun ada dana sekitar 25T yang digunakan untuk pemindahan IKN padahal kondisi ekonomi diprediksi sedang merosot dan masih mengalami pemulihan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengakui, target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada 2020 tidak akan bisa diraih dan ekonomi Indonesia akan merosot signifikan.

Menkeu Sri Mulyani sendiri memprediksi pada skenario sangat berat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada angka -0,4%.

Padahal di saat kondisi normal saja, sebelum terjadinya wabah, pemindahan IKN menuai banyak kontroversi karena dianggap tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

Selengkapnya di fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



**Amin AK, M.M**

Anggota Komisi VI I DPR RI

*Perpres Kemudahan Impor Terbit*

## **Anggota FPKS : Mafia Impor Makin Merajalela?**

*Perseorannya, penetapan keadaan tertentu tersebut, dapat dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian bersama pejabat yang ditunjuk atas nama menteri. Bisa Dirjen, atau siapapun, lewat mekanisme rapat koordinasi (pasal 4 ayat 2). Artinya, Presiden bisa cuci tangan saat impor besar-besaran terjadi (dan ini boleh dilakukan tanpa izin persyaratan teknis) sehingga bisa sangat merugikan pelaku usaha dalam negeri,"*

## Perpres Kemudahan Impor Terbit

# Anggota Fraksi PKS: Mafia Impor Merajalela?

Persoalannya, penetapan keadaan tertentu tersebut, dapat dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian bersama pejabat yang ditunjuk atas nama menteri. Bisa Dirjen, atau siapapun, lewat mekanisme rapat koordinasi (pasal 4 ayat 2). Artinya, Presiden bisa cuci tangan saat impor besar-besaran terjadi (dan ini boleh dilakukan tanpa izin persyaratan teknis) sehingga bisa sangat merugikan pelaku usaha dalam negeri

### **AMIN AK, M.M.**

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (26/04) — Kata "Mafia impor" ramai diperbincangkan setelah Menteri BUMN menyebutkan ada praktik kotor dalam impor alat kesehatan (alkes). Menurutnya, Jumlah impor alkes mencapai 90% dari kebutuhan nasional.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak mengatakan, hanya 10% saja bahan baku Alkes dan farmasi yang dipenuhi industri dalam negeri. Nilai importnya juga sangat

fantastis, sebesar US\$ 1 miliar atau sekitar Rp.15 Triliun (Data BPS, 2019).

"Alat elektronik untuk medis di peringkat pertama dengan nilai US\$ 358,8 juta. Lalu perangkat elektronik medik dan radiologi sebesar US\$ 268 juta. Alat X-Ray US\$ 87,2 juta. Alat bedah, cetakan plastik dan perangkat higienis sebesar US\$ 53,5 juta, dan lain sebagainya", paparnya

Disaat impor begitu besar,

lanjut Amin, pemerintah justru mengeluarkan Perpres No.58 tahun 2020 yang berisi penyederhanaan dan kemudahan izin impor.

"Dalam perpres tersebut, persyaratan teknis untuk izin impor dapat ditangguhkan dalam keadaan tertentu (kebutuhannya mendesak, terbatasnya pasokan dan terganggunya distribusi). Ini tertera dalam pasal 5 ayat 3", tegasnya.

Persoalannya, kata Amin, penetapan keadaan tertentu tersebut, dapat dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian bersama pejabat yang ditunjuk atas nama menteri. Bisa Dirjen, atau siapapun, lewat mekanisme rapat koordinasi (pasal 4 ayat 2).

"Artinya, Presiden bisa cuci tangan saat impor besar-besaran terjadi (dan ini boleh dilakukan tanpa izin persyaratan teknis) sehingga bisa sangat merugikan pelaku usaha dalam negeri," tuturnya.

Menurut Amin, "Keadaan tertentu" (pasal 5 ayat 3) yang membolehkan impor tanpa persyaratan teknis juga tidak detail. Misalnya saat harga



melebihi tingkat kewajaran. Tidak dijelaskan patokan angka atau presentasinya.

"Atau disebutkan terganggunya distribusi dan kurangnya pasokan yang membuka peluang pelaku usaha oligopoli yang berfungsi sebagai price maker, dapat menahan supply dan mengontrol distribusi lalu bermitra dengan mafia impor. Pasal 5 ayat 3 ini jelas-jelas adalah pasal karet," terangnya.

Pasal 4 dan 5 ini, ungkap Amin, juga menabrak ketentuan yang tertuang dalam UU 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana perizinan impor dilakukan oleh Menteri Perdagangan (pasal 49 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1 UU 7/2014).

Di pasal 6 Perpres ini

menyebutkan BUMN dapat ditugaskan melaksanakan impor produk/barang untuk pemenuhan kebutuhan, ditugaskan oleh Menteri BUMN.

"Ini juga berpotensi tumpang tindih kewenangan karena di UU Perdagangan (Pasal 45) menyebutkan bahwa "Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan menteri. Dalam hal ini Menteri Perdagangan." ungkap Amin.

Selengkapnya kunjungi Fraksi.pks.id

## RDP Dengan BKPM

# Aleg PKS Minta Investasi Bidang Kesehatan termasuk APD dan Obat

Saya meminta kepada BKPM agar memprioritaskan mencari investor untuk bidang kesehatan dan pangan yang memiliki kemampuan membangun industri berskala besar. Saat ini banyak kerancuan di lapangan khusus persoalan APD baik masalah Produksi, Distribusi maupun Ketersediaan yang merata di setiap daerah”

### Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (25/04) — Rapat Dengar Pendapat, antara Komisi VI DPR RI dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Anggota DPR dari FPKS Nevi Zuairina meminta BKPM Serious mencari investor untuk membangun industri berskala besar di bidang kesehatan dan pangan.

RDP secara virtual yang diadakan secara virtual (23/4/2020) ini, Nevi meminta dengan tegas kepada BKPM ada upaya

perencanaan investasi terintegrasi dari pusat hingga daerah.

Sesuai dengan kesimpulan rapat Komisi VI, bahwa BKPM RI perlu menyelesaikan penyusunan big data investasi yang akan mengintegrasikan investasi di sektor pertambangan (blackgold), sektor pertanian, perkebunan (greengold), sektor kelautan (bluegold) dan pariwisata dalam satu kesatuan wilayah pusat,

Propinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pembangunan Indonesia lebih terarah dan terencana dengan baik.

“Saya meminta kepada BKPM agar memprioritaskan mencari investor untuk bidang kesehatan dan pangan yang memiliki kemampuan membangun industri berskala besar. Saat ini banyak kerancuan di lapangan khusus persoalan APD baik masalah Produksi, Distribusi maupun Ketersediaan yang merata di setiap daerah”, ujar Politisi PKS ini.

Nevi mempertanyakan pemerintah pada persoalan APD yang di lapangan pada saat ini masih sangat kekurangan terutama APD yang sesuai dengan standard WHO untuk keperluan tenaga medis seperti baju hazmat, masker N95, masker bedah, dan berbagai instrumen alat pelindung diri.

Namun ada statement pemerintah yang membingungkan menurut Nevi bahwa, pekan lalu Menteri keuangan



sesuai rapat sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020) mengatakan Indonesia tetap akan mengekspor alat pelindung diri (APD) ke negara lain tanpa mengurangi kebutuhan dalam negeri untuk menangani Covid-19. Pada saat bersamaan, Pemerintah juga mengumumkan kepada negara-negara pengimpor bahwa Indonesia pun tengah membutuhkan APD.

Pemerintah menurut Nevi, hingga saat ini masih mengklaim bahwa Indonesia merasa sebagai salah satu negara penghasil APD terbesar. Bahkan suplai APD ke beberapa negara seperti Korea Selatan dan

Jepang terus dilakukan akibat kontrak dagang yang telah dilakukan.

“Sungguh ironi persoalan APD ini. Di lapangan para tenaga medis yang tersebar di berbagai Rumah Sakit di daerah teriak kurang APD terutama standard WHO. Akhirnya mereka pakai APD seadanya sehingga APD yang digunakan membahayakan Perlindungan yang palsu (False Protection)”, Tegas Nevi.

Kepada kepala BKPM, Nevi menyarankan agar Big Data investasi yang dibutuhkan negara kita, terutama investasi bidang kesehatan dan pangan harus segera direalisasikan.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

# Rafli Minta Pemerintah Sediakan Pasar Murah Online Selama Ramadhan

Kita minta Pemerintah sediakan pasar murah di Aceh, yang bisa diakses secara online. Ini dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang sulit akibat pandemi Corona, Saya minta kementerian agar membuka pasar murah online selama Ramadhan

## **RAFLI**

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Aceh

Jakarta (25/04) — Wakil rakyat Aceh yang duduk di Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rafli, meminta Pemerintah menyediakan pasar murah online di Aceh selama Ramadhan.

Hal ini, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilanda pandemi Corona.

Pemintaan tersebut disampaikan politisi Dapil Aceh 1 itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Rabu, (22/04/2020), secara virtual.

Selain itu, Rafli juga

mengusulkan revitalisasi pasar, dibangun pada lokasi titik yang sesuai dan tepat sasaran.

"Kita minta Pemerintah sediakan pasar murah di Aceh, yang bisa diakses secara online. Ini dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang sulit akibat pandemi Corona," kata Rafli.

"Saya minta kementerian agar membuka pasar murah online selama Ramadhan," imbuhnya

Terkait dengan revitalisasi pasar di Aceh, Rafli mengingatkan agar lokasi

pembangunannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai seperti banyak kasus selama ini, pasar dibangun di lokasi yang jauh dari pemukiman. "Akibatnya banyak pasar yang dibangun terbengkalai," Rafli mengingatkan.

Rapat Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan tersebut membahas penghematan dan relokasi/refocusing anggaran, serta langkah-langkah penanganan ketersediaan pasokan bahan pokok.



# Anggota FPKS Harap Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Kemandirian Industri Farmasi

Saya berharap BUMN Farmasi menjadi pelopor dalam pencegahan permainan obat dalam alat kesehatan, BUMN Farmasi harus dirasakan peran dalam menangani Covid-19 ini

## Drs. CHAIRUL ANWAR Apt

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (22/04) —Anggota DPR RI Fraksi PKS Chairul Anwar, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan holding BUMN Farmasi yaitu Bio Farma, Kimia Farma, Indo Farma dan Phapros yang langsung dihadiri langsung para Direktur Utama BUMN farmasi tersebut.

Dalam rapat tersebut diungkapkan bahwa ternyata pengadaan bahan baku obat selama ini di Industri Farmasi Indonesia 90% impor dari luar negeri, termasuk untuk memenuhi kebutuhan di masa pandemic Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI ini berharap

pandemi Covid-19 ini menjadi momentum Industri Kemandirian Industri Farmasi Indonesia terutama BUMN Farmasi yang menjadi andalan pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini.

“Momentum Covid-19 ini kami berharap menjadi langkah besar untuk Industri Farmasi terutama BUMN Farmasi untuk bisa menjadi mandiri terutama dalam pengadaan bahan baku obat yang selama sangat tergantung impor, padahal Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam yang bisa dijadikan bahan baku obat. Kami di DPR siap untuk membantu dari segi regulasi

dan daya dukung anggaran untuk mewujudkan kemandirian Industri Farmasi terutama BUMN Farmasi. Kami juga berharap agar pemerintah membuat langkah kongkrit dan membuat konsep untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor bahan baku obat,” ungkap Chairul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Virtual Komisi VI dengan BUMN Farmasi Selasa, (21/04/2020).

Terkait penanganan Pandemi, Chairul meminta agar BUMN Farmasi harus mengambil peran besar dalam mengendalikannya Covid-19.

“BUMN Farmasi harus mengambil peran besar dalam pengendalian Covid 19. Saya juga berharap pemerintah memberikan support kepada Industri Farmasi terutama BUMN Farmasi, saya juga berharap Intensif yang dialokasikan pemerintah dalam bidang kesehatan sebesar 75 T dapat melibatkan ke Industri Farmasi terutama BUMN Farmasi, selain itu Intensif daya dukung industri sebesar 70 T



berupa intensif pajak, penghapusan bea masuk terkait obat dan alat kesehatan juga bisa diberikan kepada Industri farmasi agar bisa memaksimalkan penanganan COVID 19 dalam pemenuhan obat dan alat kesehatan,” jelas politisi PKS asal Riau ini.

Selain itu juga Chairul berharap agar pemerintah memperhatikan dan menindak oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi COVID dalam permainan obat dan alat kesehatan sehingga harga menjadi sangat tinggi.

“Saya berharap BUMN Farmasi menjadi pelopor dalam pencegahan permainan obat dalam alat kesehatan, BUMN Farmasi harus dirasakan peran dalam menangani Covid-19 ini. Selain itu saya juga berharap agar pemerintah betul-betul memperhatikan kemandirian kita dalam Industri Farmasi, momentum Covid-19 ini membentuk ketahanan dalam bidang kesehatan yang juga merupakan bagian dari ketahanan dan kedaulatan Bangsa Indonesia,” tutup Chairul.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



**Dr. H. Mulyanto, M.Eng**  
Anggota Komisi VII DPR RI

## **Aleg PKS Harap Pemerintah Jangan Persulit Izin Insi- nerator Corona**

*"KLHK jangan menggunakan pendekatan business as usual di tengah kondisi krisis seperti sekarang ini. Harus ada terobosan perizinan yang mempermudah dan mempercepat proses pembakaran limbah medis APD yang sudah menumpuk ini di RS rujukan Covid-19. Jangan seperti sekarang ini dimana perizinan bersifat sentralistik sehingga menghambat proses penanganan limbah medis Covid-19,*

# Aleg PKS Harap Pemerintah Jangan Persulit Izin Insinerator Corona

KLHK jangan menggunakan pendekatan business as usual di tengah kondisi krisis seperti sekarang ini. Harus ada terobosan perizinan yang mempermudah dan mempercepat proses pembakaran limbah medis APD yang sudah menumpuk ini di RS rujukan Covid-19.

## Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Tangerang Selatan (24/04) - Dalam masa darurat Covid 19 seperti sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta mempermudah proses perizinan penggunaan insinerator limbah padat serta kiln pabrik semen sebagai tempat pembakaran limbah medis alat pelindung diri (APD) Covid 19. Izin yang selama ini hanya boleh dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.

Insinerator adalah sarana untuk membakar limbah bahan

beracun dan berbahaya (B3) yang biasanya tersedia di rumah sakit. Sementara kiln adalah sarana pemanas bersuhu optimal yang ada di pabrik semen.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto minta Pemerintah segera membuat prosedur baru tentang izin pemanfaatan insinerator dan kiln untuk menanggulangi peningkatan jumlah limbah APD Covid 19. Jangan sampai lonjakan jumlah limbah berbahaya tersebut menjadi masalah baru di saat negara sedang gencar

menanggulangi Covid 19.

"KLHK jangan menggunakan pendekatan business as usual di tengah kondisi krisis seperti sekarang ini. Harus ada terobosan perizinan yang mempermudah dan mempercepat proses pembakaran limbah medis APD yang sudah menumpuk ini di RS rujukan Covid-19.

"Jangan seperti sekarang ini dimana perizinan bersifat sentralistik sehingga menghambat proses penanganan limbah medis Covid-19," ujar Mulyanto.

Meski prosedur perizinan dibuat lebih sederhana, Mulyanto tetap minta proses penilaian aspek keselamatan lingkungan tetap dijaga.

Mulyanto hanya minta proses izin yang selama ini dilakukan di pusat dapat dilakukan di tingkat provinsi. Sebab rumah sakit yang menjadi rujukan Covid 19 ada di bawah koordinasi provinsi masing-masing.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati memperkira-



kan akan terjadi penambahan limbah Covid 19 secara masif. Sebab dari 132 rumah sakit rujukan Covid 19 baru 20 saja yang memiliki insinerator berizin.

Atas dasar informasi tersebut Mulyanto minta Pemerintah segera menambah jumlah insinerator berizin. Jika untuk mendapatkan izin tersebut

harus ada alat tambahan berstandar maka selayaknya Pemerintah menyediakan kekurangan tersebut.

Tambahan insinerator ini sangat penting. Jangan sampai tumpukan limbah Covid 19 akan menjadi sumber persebaran baru yang mengorbankan kepentingan masyarakat.

# Anggota FPKS : Jangan Hanya Naikan Volume Impor, Tapi Lupa Turunkan Harga BBM

Pertamina memanfaatkan celah merosotnya harga minyak, menambah kuota import. Saat yang sama pemerintah tidak bicara tentang penurunan harga BBM. Ini sikap anomali. Tidak responsif

## SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (23/04) — Penurunan harga minyak mentah dunia dan rendahnya konsumsi BBM membuka celah bagi PT. Pertamina (Persero) menambah minyak mentah. Alasan PT Pertamina, penambahan import minyak mentah untuk keamanan pasokan energy nasional.

Niat PT Pertamina menambah import minyak dicermati oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty, sebagai anomali dalam kebijakan migas jika tidak diikuti dengan langkah rekalkulasi atau hitung ulang harga dasar BBM dalam negeri.

"Pertamina memanfaatkan celah merosotnya harga minyak, menambah kuota import. Saat yang sama pemerintah tidak bicara tentang penurunan harga BBM. Ini sikap anomali. Tidak responsif", kritik Saadiah.

Sebagai BUMN, langkah untuk menaikkan volume import tidak serta merta lepas dari kebijakan dan persetujuan Kementerian terkait.

"Pertamina memiliki tupoksi khas, tapi kebijakan untuk menaikkan atau menambah volume import tidak lepas dari persetujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)", tandas Saadiah.

Ia mencontohkan, awal Januari 2020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas kuota impor minyak mentah atau crude oil sebesar 30 juta barel dalam setahun untuk PT Pertamina. Pemangkasan ini menyusul berlakunya kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemilik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) menjual minyak mentah kepada Pertamina.

"Hal serupa juga butuh ketetapan Kementerian ESDM untuk niat Pertamina menambah kuota Import minyak mentah. Karena adanya celah harga minyak mentah jatuh bebas di pasar internasional seperti kondisi sekarang", tandasnya.

Pertamina beralih jika mengutamakan penyerapan minyak mentah dalam negeri yang didapat baik dari bagian pemerintah (government intake), anak perusahaan pemerintah, maupun pembelian bagian SKK. Tapi Saadiah memastikan jika tambahan kuota import minyak mentah akan berlipat dibanding dengan serapan minyak mentah dalam negeri.

"Tahun misalnya, neraca migas defisit. Produksi minyak dalam negeri 808ribu barel per hari. Konsumsi 1,8 juta barel per hari. Defisit minyak meningkat 13,79% menjadi 977 ribu barel per hari dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi skema import menjadi semakin melabur dibanding serapan minyak mentah produk dalam negeri", tandasnya.

Dirinya mengingatkan Pertamina dan Kementerian ESDM untuk tidak mengabaikan



hak publik mendapatkan harga BBM Subsidi maupun Non Subsidi lebih murah.

"Harga minyak mentah yang rendah jangan hanya diarifi dengan tambahan kuota import. Namun, tidak menurunkan harga BBM bagi masyarakat. Itu mengabaikan hak publik menikmati turunnya harga BBM", imbuh politisi PKS ini.

Harga minyak mentah Brent yang merupakan patokan yang sangat dekat dengan ICP (Indonesia Crude Price) saat ini melemah. Pada penutupan perdagangan (21/4) harga Brent US\$ 25,57 per barel. Brent kembali melemah pada (22/4)

berada di level US\$ 16.98 per barel.

Formula penghitungan harga jenis bahan bakar minyak (BBM) umum non-subsidi dan non penugasan telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Evaluasinya dilakukan bulanan. Dengan harga minyak mentah yang rendah, harga keekonomian BBM jauh lebih rendah.

"Pembentukan harga BBM akan lebih rendah. Jadi wajar jika harga BBM dalam negeri sudah saatnya diturunkan. Jangan digantung apalagi diabaikan", tegas Saadiah.

PEMBAHASAN  
RUU OMNIBUS LAW  
KETENAGAKERJAAN AKHIRNYA

# DITUNDA



**Iskan Qolba Lubis**

Anggota Fraksi PKS DPR RI

PKS sudah mengingatkan akan banyak protes dari masyarakat. Kalau kita alami yang bermasalah bukan hanya klaster ketenagakerjaan tapi juga Klaster ekonomi, pertanian, lingkungan hidup, pendidikan jauh lebih dahsyat. Saya tidak ngerti siapa sih dibelakangnya? kok *ngotot* sekali, setiap kebijakan pasti seperti pepatah arab "menguntungkan satu kaum meeugikan yang lain" ini yang harus ditelusuri dan dikritisi.

## BLT Covid-19 dari Dana Desa

# Politisi PKS : Kepala Desa Harus Objektif Data Penerima Bantuan

Saya harap semua harus benar-benar masyarakat yang terdampak covid-19, juga termasuk mereka yang dalam golongan orang miskin baru, orang yang kehilangan mata pencahariannya, orang miskin yang belum terdata, dan orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (25/04) — Kasus wabah corona di Indonesia terus meningkat, Data per tanggal 24 April 2020, Kasus Positif Corona di Indonesia sudah menyentuh Angka 8.211 orang, dimana diantaranya 1.002 orang dinyatakan sembuh, dan 689 Orang meninggal dunia.

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini telah siap memberikan stimulus 405,1 T dalam penanganan wabah

serta bertujuan memutus rantai penyebaran virus corona untuk dapat membantu dan menjamin hak hidup bagi warganya.

Selain itu berbagai cara dilakukan pemerintah, Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa., adapun mekanisme penyalurannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai setiap bulan, atau ditranfer ke rekening.

Jangka waktu masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020 dan besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga. Monitoring dan evaluasi skema BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, dan Inspektorat Kabupaten/ Kota.

Sedangkan penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba



lubis menyampaikan bahwa kepala desa sebagai penanggung jawab program harus betul-betul objektif.

"Kepala Desa harus objektif dalam mendata keluarga penerima BLT Covid 19, apalagi program BLT Covid 19 ini juga ada yang dari KEMENSOS RI, nilai uang yang diterima dan mekanisme pendataannya juga hampir sama", ungkapnya.

Iskan juga berpesan saat mendata masyarakat yang terkena dampak langsung covid-19 ini, harus dilakukan secara profesional.

Saya harap semua harus benar-benar masyarakat yang terdampak covid-19, juga termasuk mereka yang dalam

golongan orang miskin baru, orang yang kehilangan mata pencahariannya, orang miskin yang belum terdata, dan orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dikarenakan penerima bantuan ini juga diluar dari penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)", tegasnya.

"Dalam pendataan, saya minta untuk tidak mengedepankan kedekatan emosional seperti keluarga, teman dekat, tetangga dan sebagainya. Saya tidak mau itu terjadi, penilaian harus objektif agar bantuan yang diberikan tepat sasaran" tutup iskan.

## Antisipasi Dampak Covid-19

# HNW Usulkan RUU Bank Makanan Jadi Prioritas

Melalui disahkannya RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial. Bila itu segera bisa dihadirkan, maka Bank Makanan bisa menjadi salah satu di antara solusi kreatif untuk menghadapi dampak sosial ekonomi berkepanjangan dari pandemi Covid-19 ini

### Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (19/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, meminta agar memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan mengatasi dampak covid-19.

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, RUU yang tepat dibahas saat ini seperti RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial sebagaiantisipasi berkepanjangan wabah Covid-19 di Indonesia, dan banyaknya korban secara sosial dan ekonomi akibat bencana nasional covid-19.

“Seluruh elemen bangsa harus inovatif-kreatif dan fokus dalam menghadapi Pandemi Covid-19 ini, termasuk DPR. Sa-

lah satu kreasi inovatif yang bisa diusahakan adalah hadirnya payung hukum seperti RUU yang sangat bermanfaat untuk kondisi saat ini dan dampaknya ke depan seperti RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial. Karenanya RUU seperti inilah yg penting untuk diprioritaskan,” ujar pria yang akrab disapa HNW ini melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (19/04).

HNW yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI yang salah satunya membidangi masalah kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan salah satu imbas terberat dari pandemi Covid-19.

“Ada banyak warga yang berkurang atau hilang penghasilannya dan daya belinya akibat pandemi ini. Padahal kebutuhan makanan sehari-hari tidak bisa ditunda-tunda. Selain bantuan sosial yang merupakan kewajiban pemerintah, mereka bisa dibantu kebutuhan dasarnya dari Bank Makanan yang dikelola oleh masyarakat secara gotong royong,” ujarnya.

HNW menjelaskan bahwa kehadiran RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial sangat diperlukan untuk memberikan dasar hukum bagi Bank Makanan yang sudah bermunculan dikelola masyarakat dan mulai bertumbuh saat ini.

“Kita perlu mendukung inisiatif dari masyarakat yang telah mendirikan Bank Makanan di berbagai daerah, dengan payung/dasar hukum yang kuat dan kokoh. Ini penting bisa menjadi perhatian bersama,” tukasnya.

Sebagai informasi, RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial telah ditetapkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019 –



2024 atas usulan Hidayat Nur Wahid melalui Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS). Namun, RUU ini belum ditetapkan ke dalam Prolegnas RUU Prioritas yang dibahas pada 2020

“Saya mengusulkan perlu ada revisi terhadap Prolegnas Prioritas 2020 tersebut, dan memasukan RUU ini ke dalam prioritas 2020 karena dengan terjadinya bencana nasional Covid-19, yang tak terduga sebelumnya, RUU ini menjadi sangat urgen, untuk menciptakan gerakan bagi masyarakat bergotong royong, juga membantu korban Covid-19, melalui Bank Makanan,” tegas HNW.

Lebih lanjut, HNW mencontohkan beberapa negara, seperti Amerika Serikat, yang

parlemennya aktif menciptakan instrumen hukum untuk merespon wabah Covid-19, dengan produk perundangan yang membantu warga korban Covid-19, di antaranya dengan Families First Coronavirus Response Act. Di negara tersebut, bank makanan sangat diandalkan oleh masyarakat AS untuk memenuhi kebutuhan mereka akibat pengangguran yang disebabkan oleh Covid-19. Ini terbukti dengan sejumlah pemberitaan, dimana masyarakat AS banyak yang membuat sampai antrian panjang di depan sejumlah bank makanan yang ada di sana.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

## Warga Meninggal Kelaparan

# Bukhori: Mensos Garda Terdepan Pelayan Rakyat!

“Mensos tidak boleh hanya sekadar memberikan instruksi dan menerima laporan dari para bawahannya semata. Dia (red: Mensos) harus rajin meninjau ke lapangan, lebih giat lagi dalam blusukan ke daerah-daerah agar mengerti bagaimana kondisi rakyat sebenarnya. Pemimpin yang baik adalah yang menjadi garda terdepan pelayan rakyat di tengah situasi krisis”

### **KH. BUKHORI, Lc., M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (23/04) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 melalui program bantuan sosial (bansos).

Namun, Bukhori juga mengingatkan agar dalam pendataan dan penyaluran bansos tersebut harus dipastikan tepat sasaran. Ia menambahkan, agar

pemerintah daerah tidak mempersulit masyarakat miskin yang belum terdata untuk memperoleh bantuan.

“Masih banyak ditemukan laporan dari sejumlah daerah terkait bansos yang salah sasaran, dimana kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan malah tidak terdata dan belum mendapat bantuan. Pemerintah daerah, dinas sosial maupun pengurus dari tingkat RT dan RW harus saling bahu membahu dan berperan aktif dalam

mengadvokasi warga yang kesulitan. Jangan persulit mereka yang belum terdata tetapi sudah masuk kriteria penerima bansos dengan berbagai dalih administratif. Ini tentang nyawa manusia” tegas Bukhori saat dihubungi di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Namun, Bukhori juga menyayangkan pernyataan Menteri Sosial Juliari Batubara yang terkesan melempar tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam menanggapi kasus meninggalnya seorang warga di Serang, Banten karena kelaparan sebagaimana dikabarkan media mainstream beberapa waktu lalu. Bukhori mendesak agar Menteri Sosial menjadi garda terdepan dalam melayani rakyat.

“Mensos tidak boleh hanya sekadar memberikan instruksi dan menerima laporan dari para bawahannya semata. Dia (red: Mensos) harus rajin meninjau ke lapangan, lebih giat lagi dalam blusukan ke daerah-daerah agar mengerti bagaimana kondisi rakyat sebenarnya. Pemimpin yang



baik adalah yang menjadi garda terdepan pelayan rakyat di tengah situasi krisis” sambungnya.

Lebih lanjut, Bukhori mendorong agar setiap masyarakat mulai membangun kesadaran pentingnya solidaritas sosial. Ia meminta agar setiap warga di lingkungan tempat tinggalnya menjadi mata dan telinga bagi tetangganya yang lain.

“Kemampuan pemerintah itu terbatas sehingga tidak bisa membantu secara keseluruhan. Jika ada tetangga yang kelaparan dan belum memperoleh bantuan, silakan bisa laporkan ke RT atau kelurahan. Lebih bagus lagi jika warga kemudian berinisiatif memberikan santunan secara kolektif kepada mereka yang kekurangan” pungkask Politisi PKS ini.

# Terapkan PSBB, Timwas Bencana Covid-19 DPR RI Kunjungi Jawa Barat

Kunjungan ke Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat dilaksanakan untuk memperoleh informasi dan masukan tentang kebijakan PSBB yang sudah diterapkan di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif dan empiris mengenai kebijakan dan permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut

## Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Bandung (26/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, bersama tim pengawas Penanganan Covid-19 melakukan Kunjungan kerja ke PT. Bio Farma (Persero) dan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat.

Tim Pengawas Bencana Covid-19 DPR RI, yang berjumlah 14 orang ini berkunjung ke Produsen Vaksin dan Antiserum PT. Bio Farma (Persero) untuk memperoleh informasi dan

masukan terkait proses pembuatan Vaksin antivirus Covid-19 sehingga diperoleh gambaran tentang upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan, pemulihan serta penanggulangan wabah Covid-19

"Kunjungan ke Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat dilaksanakan untuk memperoleh informasi dan masukan tentang kebijakan PSBB yang sudah diterapkan di beberapa

kota dan kabupaten di Jawa Barat sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif dan empiris mengenai kebijakan dan permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut", ungkap Nur Azizah.

Sebagaimana diketahui Pemprov Jabar terapkan PSBB di 10 Wilayah dari Total 27 Kota Kabupaten di Jawa Barat dengan Wilayah Bandung Raya memulai PSBB pada (22/04/2020) adalah Kota Bandung, Kab Bandung, Kab Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang

Sedang untuk 5 Wilayah lainnya di Jawa Barat yang sudah terapkan PSBB (15/04/2020) adalah Kota Depok, Kota Bogor, Kab Bogor, Kota Bekasi dan Kab Bekasi.

Sementara itu saat rapat bersama Dirut Induk Holding Farmasi BUMN PT. Bio Farma dan jajarannya, Nur Azizah Tamhid, mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih karena PT. Bio Farma telah melakukan upaya-upaya preventif dalam mencegah berkembangnya



Wabah Covid-19.

"Saya Mengutip QS. Al-Maidah: 32 tentang betapa besarnya pahala bagi siapapun, karena mencegah meninggalnya seseorang atau memelihara kehidupan manusia maka seolah-olah telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya," papar Nur Azizah.

Sementara itu pada rapat dengan Gubernur Jawa Barat, Nur Azizah Tamhid, mengusulkan seluruh Kota Kabupaten di

Jawa Barat agar terapkan PSBB sebagai upaya serius untuk menghentikan penyebaran Covid-19

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun merespon positif dan akan mengupayakannya, namun izin penerapan PSBB ada di Pemerintah Pusat, Gubernur pun meminta Timwas untuk ikut membantu mengawal usulan penerapan PSBB se-Jawa Barat.



Pengadaan dan  
Distribusi APD untuk  
Rumah Sakit

# BURUK

“

Bagaimana mungkin akan maksimal melakukan penanganan terhadap pasien Covid 19, jika tenaga medis tidak dilindungi dengan aman dan baik. Saat ini banyak RS mengeluh kekurangan APD, sehingga pada akhirnya menggunakan perlengkapan yang ala kadarnya saat menghadapi pasien”

**H. Ansory Siregar, Lc**  
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

# Anshori Nilai Pengadaan dan Distribusi APD untuk Rumah Sakit Buruk

“Bagaimana mungkin akan maksimal melakukan penanganan terhadap pasien Covid 19, jika tenaga medis tidak dilindungi dengan aman dan baik. Saat ini banyak RS mengeluh kekurangan APD, sehingga pada akhirnya menggunakan perlengkapan yang ala kadarnya saat menghadapi pasien”

## H. ANSORY SIREGAR, Lc

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Jakarta (23/04) — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Anshory Siregar menyayangkan lambannya Pemerintah dalam melakukan pengadaan dan mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis ke Rumah Sakit (RS). Hal ini terlihat dari terlalu banyak rapat yang digelar hanya untuk mengevaluasi pengadaan dan distribusi APD.

“Bagaimana mungkin akan maksimal melakukan

penanganan terhadap pasien Covid 19, jika tenaga medis tidak dilindungi dengan aman dan baik. Saat ini banyak RS mengeluh kekurangan APD, sehingga pada akhirnya menggunakan perlengkapan yang ala kadarnya saat menghadapi pasien” disampaikan Anshory Siregar dalam rilis pers yang disampaikan kepada media pada hari Kamis (23/04).

Anshory memaparkan kronologis berlarut-larutnya

rapat pembahasan APD, terlebih masalah terjadi karena kebijakan Pemerintah yang tidak terencana dan Responsive.

Tercatat Komisi IX telah berulang kali rapat dengan Pemerintah membahas APD, diantaranya pada tanggal 14 Maret rapat bersama Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Covid 19. Kemudian tanggal 2 April rapat antara Gugus Tugas, Kemenkes dan Kementerian lain yang terkait. Rapat tanggal 8 dan 14 April 2020 dengan beberapa Dirjen di lingkungan Kemenkes. Terakhir rapat hari tanggal 21 April 2020.

“Rumah sakit rujukan baik di Jakarta maupun diluar, seperti RS Adam Malik Medan, RS Karyadi Semarang dan RS lainnya sudah tidak bisa terhitung berapa banyak tenaga medis baik itu dokter maupun perawat yang terpapar dan menjadi korban. Apalagi para korban ini banyak yang dokter-dokter Spesialis.” tegasnya.

Dirinya juga menambahkan, Kementerian



Kesehatan harus memastikan bahwa APD terdistribusi dengan maksimal mulai dari rumah sakit-rumah sakit hingga tingkat Puskesmas. Dirinya mengingatkan jangan sampai rapat Komisi IX dengan Kemenkes dimasa yang akan datang hanya berputar-putar membahas urusan APD. Sungguh sangat tidak produktif dan tidak efisien.

“Kalau seminggu, dua minggu APD kekurangan mungkin masih bisa dimaklumi. Kini sudah lebih sebulan banyak RS masih teriak kekurangan APD, padahal kita punya segala-galanya.” tegasnya.

# TIDAK BOLEH ADA KEKURANGAN APD

Harus ada hitungan total

- ✔ Berapa kebutuhan,
- ✔ Berapa ketersediaan,
- ✔ Bagaimana memenuhinya
- ✔ Apa antisipasi atas kondisi terburuknya.

Perlu rumusan rasio kebutuhan APD dengan jumlah pasien terbanyak.



Setelah ada hitungan tersebut, Kemenkes bisa membuat jadwal periode pengadaannya.

“

Prinsipnya, tidak boleh ada kekurangan APD, karena membuat resah para pejuang di garda terdepan perang melawan Covid-19 tersebut

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

## Distribusi APD Terkendala birokrasi,

# Netty : Pemerintah Harus Perbaiki Sistem

Sampai saat ini, pemerintah belum mengumumkan kebutuhan APD dalam penanganan Covid-19 ini. Adapun ketersediaan dokter, website Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyertakan jumlah dokter di Indonesia ada sebanyak 175.138 orang. Berapa sebenarnya kebutuhan APD di Indonesia?

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.**

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (24/04) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani menyayangkan lambatnya distribusi APD dari pemerintah pusat kepada tenaga kesehatan yang menangani covid-19 di berbagai daerah. Kekesalan ini bertambah setelah mendengar keluhan yang sama dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Pemerintah seperti terus bermain dengan masalah. Sebelumnya rakyat menggugat pemerintah karena tidak menyiapkan APD bagi tenaga kesehatan dengan dalih stok dan anggaran tidak ada.

Sekarang anggaran sudah diturunkan dan APD sudah ada, malah lambat dalam distribusinya. Apa pemerintah tidak kasihan kepada tenaga kesehatan yang harus berjibaku menangani pasien covid-19? Karena menunggu APD yang tak kunjung datang”, imbuh Netty.

Pihak IDI mendapatkan aspirasi dari para dokter di berbagai daerah bahwa distribusi APD masih terhambat salah satunya dikarenakan persoalan birokrasi. Sehingga, dokter di RS meminta bantuan APD kepada IDI. Kemudian IDI melaporkan kondisi tersebut

kepada BNPB selaku gugus nasional covid-19.

“ Di era revolusi 4.0 harusnya berimbas pada mental dan manajemen pengelolaan pemerintahan yang semakin baik (good governance), bukan terpenjara dengan alur birokrasi yang usang. Di masa bencana ini, cepat dan tepat itu harus menjadi tagline bagi gugus tugas covid-19 baik pusat maupun daerah. Potong alur birokrasi yang memperlama rantai distribusi. Jika cara kemarin gagal, segera evaluasi dan perbaiki, jangan malu”, sambung politisi PKS ini.

Gugus tugas nasional covid-19 melaporkan sampai saat ini sudah menyalurkan sebanyak 871.150 APD ke berbagai daerah. Proses distribusinya dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama dikirim oleh pesawat milik TNI untuk wilayah perbatasan dan sulit akses transportasi. Kedua, gugus tugas daerah selain perbatasan mengambil bantuan secara mandiri, yaitu dengan mengirimkan perwakilannya ke Jakarta untuk mengambil lalu kemudian mendistribusikannya.



“ Gugus tugas pasti punya data berapa rumah sakit yang sedang menangani pasien terkonfirmasi maupun PDP, baik di zona merah maupun tidak. Selain itu, data yang didapat seharusnya lengkap seperti kondisi terkini, RS yang terlibat, puskesmas yang tersedia, termasuk kebutuhan APD tiap RS dan puskesmas. Sehingga gugus tugas dapat langsung mengirimkan kebutuhan lapangan terutama ke RS dan laboratorium yang menjadi rujukan utama covid-19 berdasarkan prioritas. Gugus tugas daerah tinggal mendistribusikan ke RS dan puskesmas lainnya. Saya mendapatkan keluhan dari tenaga

kesehatan di puskesmas di Wakatobi Sulawesi tenggara, mereka baru menerima 1 APD saja. Padahal mereka bertugas juga mendeteksi penumpang kapal yang baru tiba dari zona merah”, ucap Netty miris.

Sampai saat ini, pemerintah belum mengumumkan kebutuhan APD dalam penanganan Covid-19 ini. Adapun ketersediaan dokter, website Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyertakan jumlah dokter di Indonesia ada sebanyak 175.138 orang. Berapa sebenarnya kebutuhan APD di Indonesia?

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Selalu Kekurangan APD,

# Mufida: Apa Pemerintah Punya Data Kebutuhan APD?

Harus ada hitungan totalnya berapa kebutuhan, berapa ketersediaan, bagaimana memenuhinya dan apa antisipasi atas kondisi terburuknya. Perlu rumusan rasio kebutuhan APD dengan jumlah pasien terbanyak

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (26/04) -- Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dan Gugus Tugas Covid-19 harus punya data valid tentang kebutuhan Alat Pelindungan Diri (APD) bagi para tenaga medis dan kesehatan yang menangani pasien Covid-19.

Dengan demikian upaya pemenuhannya dapat terpenuhi dengan baik. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menegaskan hal tersebut, Sabtu (25/04/2020).

Menurutnya, saat ini pemerintah belum memiliki data valid kebutuhan APD pada tenaga medis dan kesehatan Covid-19.

"Masih sangat sering

terdengar berita kekurangan APD di RS dan fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh Indonesia. Banyak terdengar juga keluhan hingga jeritan para tenaga medis yang menyuarakan kecemasan mereka berperang tanpa perlengkapan tempur yang memadai. Puluhan rekan sejawat mereka juga telah banyak yang gugur karena melayani pasien OTG tanpa APD", paparnya.

Kabar terbaru, lanjut Mufida, seorang bayi berstatus Pasien Dalam Perawatan (PDP) di RSUD Buton Tengah, Sulawesi Tenggara akhirnya meninggal dunia, Kamis (23/04/2020) karena perawat terpaksa "menjaga jarak" dan

tak mau mengambil risiko lantaran keterbatasan APD.

"Pemerintah punya data nggak tentang kekurangan APD ini dimana-mana?" sergah Mufida.

Mufida menambahkan, banyaknya aksi pengalangan donasi di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan APD ini, patut disyukuri. Sebab, ini menunjukkan tingginya kepedulian sesama warga bangsa.

"Tapi ini juga jadi pertanyaan, kemana negara yang seharusnya berkewajiban memenuhi kebutuhan APD para tenaga medis ini?" tegas anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Karena itu, Mufida menekankan pentingnya Kemenkes memastikan tersedianya data valid kebutuhan APD seluruh tenaga medis Covid-19 di Indonesia meliputi pakaian, caps, towel, masker, sarung tangan, pelindung kaki, pelindung tangan dan pelindung wajah (doodle).

"Harus ada hitungan totalnya berapa kebutuhan, berapa ketersediaan, bagaimana memenuhinya dan



apa antisipasi atas kondisi terburuknya. Perlu rumusan rasio kebutuhan APD dengan jumlah pasien terbanyak," tegas anggota DPR dari Dapil DKI Jakarta 2 ini.

Setelah ada hitungan tersebut, lanjut Mufida, Kemenkes bisa membuat jadwal periode pengadaannya. Prinsipnya, tidak boleh ada kekurangan APD, karena membuat resah para pejuang di garda terdepan perang melawan Covid-19 tersebut.

Selanjutnya, Mufida menambahkan, pemerintah

juga harus memastikan ketersediaan anggaran untuk pengadaan APD ini. Jadi, harus ada jaminan ketersediaan APD, harus ada SOP dari hulu ke hilir di setiap tahapan dari bahan baku, produksi, distribusi sampai dengan harga jual.

"Pemerintah wajib hadir memberikan jaminan ketersediaan APD untuk semua faskes termasuk Faskes swasta dengan harga terjangkau," pungkas Mufida.



## OPINI

Fraksi.pks.id | Selasa 28 April 2020

# Perlindungan PMI di Malaysia: Harga Diri Bangsa dan NKRI

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS



# Perlindungan PMI di Malaysia: Harga Diri Bangsa dan NKRI

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS

**A**KHIRNYA, pada tanggal 15 April 2020, Presiden Joko Widodo secara resmi menunjuk Benny Ramdhani menjadi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang baru. Baru diangkat, Benny langsung dihadapkan dengan persoalan besar dan berat.

Jutaan PMI di Malaysia dan negara lain terjangkit Covid 19 menanti perlindungan dari Pemerintah Indonesia. BP2MI wajib melakukan perlindungan PMI yang terdampak pandemi global virus Covid-19. Ketika

hampir semua negara di dunia mengalami wabah Covid-19 ini, maka secara langsung hal tersebut berpengaruh terhadap PMI yang bekerja disana. BP2MI ini adalah lembaga yang dibentuk oleh UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

## PR yang Tertunda

Berbicara mengenai PMI, tanpa mengecilkan semua langkah yang telah dilaksanakan oleh pejabat terdahulu, BP2MI ini memiliki berbagai Pekerjaan Rumah (PR) tertunda yang

banyak dan berat.

Sebut saja tiga hal di antaranya. Pertama, peran BP2MI yang dirasakan belum maksimal, baik dalam masa persiapan, masa pengiriman, masa perlindungan kerja dan masa purna PMI.

Kedua, penjaminan dan perlindungan PMI, terutama asuransi pekerja yang belum menjamin dan memberikan perlindungan kepada PMI. Ketiga, kurangnya BP2MI dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan negara pengguna jasa PMI.

Kondisi PMI di Malaysia patut diberi perhatian khusus. Ada beberapa alasan yang mendasarinya, di antaranya, karakteristik PMI di Malaysia relatif berbeda dengan negara-negara lain, yaitu sebagian (besar) PMI di Malaysia justru bekerja sebagai pekerja ilegal atau undocumented.

Hal ini dikarenakan beberapa hal, seperti banyaknya pintu masuk non resmi di perbatasan Indonesia-Malaysia, sedangkan kebutuhan pekerja sangat besar dan harapan gaji yang lebih besar dibandingkan bekerja di dalam negeri.

Hal lain, karena belum ada



Kondisi PMI di Malaysia patut diberi perhatian khusus. Ada beberapa alasan yang mendasarinya, di antaranya, karakteristik PMI di Malaysia relatif berbeda dengan negara-negara lain, yaitu sebagian (besar) PMI di Malaysia justru bekerja sebagai pekerja ilegal atau undocumented.



# Perlindungan PMI di Malaysia ... hal 2



**TES RAPID PMI MALAYSIA**

Foto : listmewa

Dengan perbedaan data tersebut, maka perlindungan terhadap WNI juga akan terganggu. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) akan sangat sulit melakukan perlindungan terhadap WNI yang tidak mampu mereka data atau tidak mereka ketahui.

kesepakatan tertulis di antara kedua negara. Informasi terakhir, MoU antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia sudah berakhir dan hingga saat ini belum ada perpanjangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Di satu pihak, jumlah PMI yang besar dan juga sudah berlangsung lama, sedangkan di lain pihak, belum ada dasar hukum antar negara yang mengatur. Hal ini biasanya akan sangat merugikan PMI jika terjadi suatu hal yang berkaitan

hukum.

Hal lainnya lagi adalah jumlah PMI di Malaysia sangat besar. Data terakhir, sebanyak 2,5 - 3 juta WNI berada di Malaysia, dengan sebagian besarnya adalah PMI (baik yang legal maupun undocumented).

Dengan sejumlah kondisi di atas, sangat realistis jika pada saat ini BP2MI wajib menaruh perhatian lebih besar dan fokus dengan kondisi PMI di Malaysia.

## WNI dan Covid-19 di Malaysia

Per tanggal 16 April 2020, Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) merilis data resmi yang menyebutkan ada 108 WNI positif terinfeksi Covid-19. Namun, kalau kita melihat rilis dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, ternyata datanya amat berbeda.

Kemenlu RI menyatakan bahwa di Malaysia terdapat 44 WNI yang positif Covid-19, dengan 7 dinyatakan sembuh, 35 stabil dan 2 meninggal dunia. Tentu saja perbedaan data ini sangat disesalkan.

Dengan perbedaan data tersebut, maka perlindungan terhadap WNI juga akan terganggu. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) akan sangat sulit melakukan perlindungan

terhadap WNI yang tidak mampu mereka data atau tidak mereka ketahui.

Akibatnya, WNI tersebut tidak akan mendapatkan bantuan dan perlindungan yang selayaknya. Oleh karena itu, perlu didorong adanya kerja sama antar negara dengan negara terkait, dalam hal ini Malaysia, agar data yang disampaikan sama dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Sampai saat ini, BP2MI belum mampu memiliki data yang dapat dijadikan pegangan terkait jumlah PMI yang ada dan bekerja di Malaysia. Jika melihat data PMI yang dirilis oleh BP2MI, akan tampak bahwa data tersebut sangat jauh di bawah data yang sebenarnya ada.

Bahkan, data PMI yang dimiliki oleh KBRI ternyata orangnya sudah tidak ada lagi di Malaysia. Hal ini tampak pada saat dilakukan pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu. Sebagian besar data pemilih yang tercantum dalam DPT Malaysia, ternyata tidak valid.

Data PMI yg terdapat hingga saat ini, di Malaysia, terdapat sekitar 704.175 PMI. Mereka tersebar dan bekerja di berbagai sektor. Di perladangan/plan-tation tercatat 201.050 PMI,

pembinaan (konstruksi) 153.470 PMI, manufacturing/pabrik 139.163 PMI, pekerja domestik 92.405 PMI, pertanian/farming 75.061 PMI, jasa/service 43.026 PMI.

Kondisi PMI di Malaysia di tengah pandemi Covid-19 saat ini sangat memprihatinkan. Malaysia saat ini menerapkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang pada pokoknya adalah kebijakan lockdown di wilayahnya.

Atas kebijakan ini, semua pihak dalam negara Malaysia dilarang untuk melakukan berbagai aktivitas dan pekerjaan yang semestinya mereka lakukan. Akibatnya, banyak PMI yang bekerja sebagai tenaga kerja harian kehilangan mata pencahariannya.

Hal ini ditambah berat dengan kebijakan pelarangan untuk bepergian sehingga menyebabkan adanya kendala dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, Pemerintah Malaysia memberikan bantuan langsung bagi warga negaranya, sedangkan bagi warga negara asing, tidak ada bantuan dan jaminan kehidupan sebagaimana warga negara Malaysia.

Dampaknya sangat luar biasa bagi seluruh masyarakat yang ada di Malaysia. Terkhusus bagi WNI (dan PMI), mereka

# Perlindungan PMI di Malaysia ... Tamat

merasakan kondisi yang sangat buruk. Mereka tak memiliki uang dan makanan. Karena sebagian dari mereka tidak terdanta oleh pemerintah Indonesia, maka keberadaan mereka juga tidak dapat dijangkau oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini KBRI.

Di sinilah tantangan besar yang diemban BP2MI saat ini. Sebagai kepala BP2MI, tugas utamanya adalah memastikan perlindungan bagi PMI dan keluarganya. Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, perlindungan hukum, ekonomi dan sosial. Ini merupakan tugas dan kewajiban langsung BP2MI sebagaimana tercantum dalam UU. Suatu tugas yang amat sangat berat.

Untuk itu, sudah sepatutnya BP2MI, segera melakukan hal-hal sebagai berikut.

**Pertama**, menjalin kerjasama yang erat dengan pihak KBRI, serta bersama dengan Kemenu RI segera melakukan pembicaraan bilateral dengan pihak negara Malaysia.

**Kedua**, menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga kemanusiaan, lembaga sosial masyarakat yang selama ini berjuang dan beroperasi di Malaysia, sehubungan dengan perlindungan terhadap PMI.

**Ketiga**, segera mendorong pemerintah Malaysia untuk secepatnya melakukan pembicaraan dan penandatanganan kerja sama antar negara terkait PMI.

**Keempat**, segera menolong PMI yang saat ini sedang menderita di negara tetangga

Hal ini sangat diperlukan sebagai dasar bagi pemerintah Indonesia dan PMI sebagai bagian dari perlindungan baik di bidang ketenagakerjaan maupun aspek lainnya.

## Selamatkan PMI di Malaysia : Marwah Bangsa

Sedang langkah mendesak yang harus segera dicarikan jalan keluarnya saat ini juga adalah melakukan kesepakatan dengan pemerintah Malaysia agar dapat menjangkau dan memberikan bantuan kemanusiaan bagi seluruh PMI dan WNI yang ada dan sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Sejumlah sumber menginformasikan bahwa PMI banyak yang sudah kesulitan makanan. Ada yang 2 hari sekali makan.

Harapannya, selain pemerintah Indonesia (melalui KBRI), pemerintah Malaysia juga dapat memberikan izin dan keleluasaan bagi berbagai lembaga kemanusiaan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat Indonesia di Malaysia. Karena banyak lembaga yang ingin membantu tapi kesulitan dalam perijinan dan hal lainnya

Harapannya, selain pemerintah Indonesia (melalui KBRI), pemerintah Malaysia juga dapat memberikan izin dan keleluasaan bagi berbagai lembaga kemanusiaan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat Indonesia di Malaysia. Karena banyak lembaga yang ingin membantu tapi kesulitan dalam perijinan dan hal lainnya



LAYANAN KBRI BERHENTI AKIBAT LOCKDOWN

Foto : istimedia

Langkah lain yang bisa dilakukan adalah BP2MI menjemput PMI pulang kembali ke Indonesia, jangan biarkan PMI hidup terlunta di negara tetangga

Selain itu, BP2MI juga harus segera bekerja sama dengan KBRI agar dapat membujuk pemerintah Malaysia untuk memberikan jaminan

perlindungan hukum bagi PMI, terutama dalam hal jaminan tanggungan yang seharusnya diterima oleh PMI agar tetap dapat diterima.

Hal ini sangat penting karena banyak keluarga yang sangat berharap dan bergantung kepada keluarganya yang bekerja di Malaysia. (\*)



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

## **Ledia Usulkan Libatkan Mahasiswa dalam Penyiapan Bahan Ajar Sekolah**

**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si.,M.Psi.T**  
Anggota Komisi X DPR RI

*"Insya Allah ini bisa menjadi solusi bersama untuk mempercepat ketersediaan bahan ajar yang siap tayang di TVRI. Bagi mahasiswa kegiatan ini bisa menjadi pengganti magang atau salah satu komponen penilaian tugas akhir, juga menjadi bahan dokumentasi bagi Pustekkom dan TVRI serta bahan ajar bagi peserta didik di seluruh Tanah Air.*

# Ledia Usulkan Libatkan Mahasiswa dalam Penyiapan Bahan Ajar Sekolah

Insya Allah ini bisa menjadi solusi bersama untuk mempercepat ketersediaan bahan ajar yang siap tayang di TVRI. Bagi mahasiswa kegiatan ini bisa menjadi pengganti magang atau salah satu komponen penilaian tugas akhir

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si.,M.Psi.T**

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (28/04) — Pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir membutuhkan persiapan yang terencana dan berkesinambungan, termasuk penyediaan bahan ajar untuk mengantisipasi bila Program Belajar Jarak Jauh masih akan diperpanjang waktunya.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, usai melakukan rapat jarak jauh dengan pimpinan TVRI, Senin (27/04/2020).

"Info yang kami terima, Pustekkom Kemdikbud sampai saat ini belum bisa menyedia-

kan bahan ajar yang siap untuk ditayangkan TVRI untuk jadwal lebih dari 3 bulan, padahal kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, sehingga ada kemungkinan masa anak didik belajar dari rumah masih akan diperpanjang. Kalau demikian maka ketidaksiapan tayangan bahan ajar bisa menjadi problem tersendiri terutama bagi pendidik dan anak didik di pelosok," kata Ledia

Sementara itu Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbud, Muhammad Hamid, menyatakan kepada media bahwa Kemen-

terian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri saat ini tengah mempersiapkan skenario belajar dari rumah bila Program Belajar Jarak Jauh harus diperpanjang sampai akhir tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut menurut Ledia, Kemendikbud tentulah harus ngebut mempersiapkan bahan ajar yang siap tayang bagi siswa didik untuk jangka panjang juga, minimal sesuai dengan penyiapan skenario belajar di rumah sampai akhir tahun.

"Lebih baik sudah siap dengan bahan ajar untuk program belajar dari rumah lalu ternyata kita mengalami recovery lebih cepat, daripada tidak siap lalu tergesa-gesa dan hasilnya tidak maksimal," katanya

Sebagai salah satu langkah membantu percepatan penyediaan bahan ajar, Sekretaris Fraksi PKS ini lantas mengusulkan agar mahasiswa bisa dilibatkan. Hal ini sekaligus merupakan tantangan bagi implementasi konsep Kampus Merdeka yang digagas Menteri Nadiem Makarim.



"Mahasiswa bisa diberi penugasan membuat bahan animasi/audio visual sebagai bahan tayangan materi pembelajaran. Isi substansinya adalah bahan dari Kemendikbud, hasilnya direview oleh dosen, kampus dan Pustekkom. Selain menjadi nilai tersendiri bagi mahasiswa, tayangan yang berkualitas baik bisa ditampilkan di TVRI. Hal ini tentu membantu Pustekkom memiliki suplai bahan ajar yang cukup sekaligus memberikan nilai plus bagi mahasiswa." sambungnya

Dalam konsep Kampus Merdeka ala Nadiem, mahasiswa memang diberi keluwesan dalam menjalani perkuliahan. Belajar lintas prodi, belajar di

luar kampus hingga magang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh penilaian yang menunjang kelulusan.

Karenanya Ledia yakin ide melibatkan mahasiswa dalam penyiapan bahan ajar merupakan satu wujud implementasi Kampus Merdeka.

"Insya Allah ini bisa menjadi solusi bersama untuk mempercepat ketersediaan bahan ajar yang siap tayang di TVRI. Bagi mahasiswa kegiatan ini bisa menjadi pengganti magang atau salah satu komponen penilaian tugas akhir, juga menjadi bahan dokumentasi bagi Pustekkom dan TVRI serta bahan ajar bagi peserta didik di seluruh Tanah Air." tutup Ledia

## Kisruh Anggaran Triliunan Kartu Prakerja

# Fikri Faqih: Realokasi Bermasalah

pemotongan dana-dana tersebut haruslah mempunyai alokasi yang jelas dan transparan, bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Clear-kan* dulu tugas pemerintah, bukan menunggu dibuka oleh publik

### Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil ketua Komisi X DPR RI

Semarang (22/04) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mengkritik kebijakan pemerintah yang memotong anggaran triliunan dari para mitra komisi X DPR, namun malah muncul rumor alokasi anggaran untuk perusahaan berbau nepotis dari lingkungan istana, yang disinyalir milik salah seorang Staf Khusus Presiden.

“Belum jelas realokasi pemotongan dari para mitra secara detail, malah muncul kabar-kabar miring, artinya realokasi ini belepotan,” ujar politisi PKS ini di Semarang, Senin (20/04/2020).

Akhir maret lalu, Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi jilid 3 menghadapi terjanngan wabah Covid-19 yang diklaim akan menggoyang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.

“Buntutnya terjadi pemotongan anggaran disana-sini, termasuk mitra komisi X,” kata Fikri.

Fikri merujuk pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur APBN 2020 sebagai peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Perubahan APBN 2020 tanpa melalui proses pembahasan di DPR Ini yang jadi bermasalah,” cetusnya. Ia menambahkan soal sifat Perppu yang dapat langsung berlaku begitu terbit, tanpa menunggu persetujuan DPR. Sehingga, kemudian Perpres nomor 54/2020 menjadi landasan untuk merombak

APBN,” terangnya.

Lebih jauh Fikri merinci pemotongan anggaran terjadi pada semua Kementerian/ Lembaga yang menjadi mitra Komisi X DPR, yakni Kemendikbud, Kemenparekraf, Kemenpora, dan Perpustakaan. Mendikbud dipotong Rp. 4,98 T, Kemenparekraf/Baparekraf dipotong Rp. 1,09 T, Kemenpora dipotong Rp. 270,2 M, dan Perpustakaan dipotong Rp. 106,6 M. “Totalnya mencapai Rp. 6,44 T,” kata Fikri.

Menurut rilis yang diterbitkan kantor Presiden sebelumnya, bahwa stimulus ekonomi jilid 3 menggelontorkan dana total Rp. 405,1 T. Alokasi anggaran sebesar itu antara lain dirinci untuk biaya pelatihan bagi pemegang kartu pra kerja sebanyak 5,6 juta penerima dan masing-masing senilai Rp. 1 juta. Sebagai pelaksanaannya, istana menunjuk 8 (delapan) mitra perusahaan berbasis daring, yang salah satunya (ruang guru) merupakan milik salah satu staf khusus milenial.

Karenanya, Fikri menuntut penjelasan terkait realokasi anggaran mitra-mitra DPR, “Tidak hanya komisi X saya kira, karena untuk mencapai Rp. 405,1 T dipotong juga anggaran



di K/L lain,” imbuhnya.

Kemudian, Fikri juga mencernati anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana desa yang dipotong mencapai Rp. 23,26 T.

“Dari situ termasuk pemotongan tunjangan guru sebesar Rp.3,3 T, dan pemotongan dana BOS Rp. 1,1 T,” ujarnya.

Fikri menegaskan, pemotongan dana-dana tersebut haruslah mempunyai alokasi yang jelas dan transparan, bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Clear-kan dulu tugas pemerintah, bukan menunggu dibuka oleh publik,” tutupnya.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



## Diskusi Virtual bersama Masyarakat Ekonomi Syariah ANIS BERI CATATAN KRITIS PERPPU 1/2020

Pemerintah perlu mempertimbangkan melakukan efisiensi belanja. ruang fiskal semakin sempit karena besarnya belanja-belanja wajib (rutin) seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bunga utang, meningkatkan efektivitas dan pengaruh komponen belanja-belanja pemerintah pusat menurut fungsi. Kemudian Pos-pos belanja rutin yang tidak diperlukan segera dialihkan kepada pos belanja lain

**Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

Diskusi Virtual bersama Masyarakat Ekonomi Syariah

# Anis Beri Catatan Kritis Perppu 1/2020

Ada banyak ruang efisiensi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah. Misalnya, perjalanan dinas dalam negeri, dan belanja barang non-operasional, yang banyak digunakan untuk honorarium, penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kota, paket rapat, dan lainnya, dalam kondisi wabah seperti ini, belanja non-operasional diperkirakan tidak akan banyak bermanfaat.

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (26/04) — Pemerintah RI mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka mengatasi pandemi virus Covid-19.

Ada sekitar tiga kebijakan strategis yang dibuat pemerintah, yang paling disorot Anggota DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati yakni Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Anggota Komisi XI tersebut dalam diskusi Masyarakat Ekonomi Syariah menyampaikan beberapa kritisi terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Pertama, lanjut Anis, jika Pemerintah berencana melakukan upaya penanganan Covid-19 skala besar melalui penerbitan Perppu 1/2020, dengan

nilai belanja mencapai Rp 405 Triliun. Dimana sumber pembiayaan utamanya adalah dengan melebarkan defisit yang mencapai di atas 5%. Maka Pemerintah harus bergerak cepat dan melakukan alokasi belanja yang sesuai dengan kebutuhan.

"Pemerintah harus melakukan dua tahap, yaitu: optimalisasi realokasi anggaran, dimana belanja-belanja yang tidak dibutuhkan dapat dialihkan untuk belanja penanganan dampak wabah Covid-19," pungkasnya.

Kemudian yang kedua, Anis menambahkan, adalah ekspansi fiskal, dengan menambah defisit anggaran sebagai bentuk stimulus perekonomian.

"Tentang optimalisasi realokasi anggaran, Pemerintah perlu mempertimbangkan sebagai tindakan efisiensi belanja. ruang fiskal semakin sempit karena besarnya belanja-belanja wajib (rutin) seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bunga utang, meningkatkan efektivitas dan pengaruh komponen belanja-belanja pemerintah



pusat menurut fungsi. Kemudian Pos-pos belanja rutin yang tidak diperlukan segera dialihkan kepada pos belanja lain," paparnya.

Anis berpendapat bahwa ada banyak ruang efisiensi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah. "Misalnya, perjalanan dinas dalam negeri, dan belanja barang non-operasional, yang banyak digunakan untuk honorarium, penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kota, paket rapat, dan lainnya", imbuh Anis.

Menurut Anis, dalam kondisi wabah seperti ini, belanja non-operasional diperkirakan tidak akan banyak bermanfaat.

Kedua, kata Anis yang juga merupakan Doktor lulusan

terbaik Universitas Airlangga ini juga menyoroti tentang ekspansi fiskal yang dilakukan Pemerintah.

"Kebijakan ekspansi fiskal diperlukan tetapi berbiaya tinggi. Pemerintah dinilai masih kesulitan menjaga anggaran dengan baik, terbukti dari realisasi defisit APBN ternyata membengkak dari target awal. Berdasarkan rilis Kementerian Keuangan, defisit tahun 2019 mencapai Rp 353 Triliun, atau membengkak sebesar 19,2% apabila dibandingkan dengan kesepakatan di APBN 2019 yang sebesar Rp 296 Triliun atau 1.84 persen PDB.

Selengkapnya kunjungi Fraksi.pks.id

# Perpres No. 54 Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 dinilai Bermasalah

“Dalam kondisi krisis berat seperti apapun belum ada preseden pemerintahan kita sebelumnya yang gunakan Perpres untuk Perubahan APBN. Ini baru pertama terjadi dalam sejarah kita, Perubahan APBN hanya diatur dalam Perpres. Ini meyalahi tradisi dan konstitusi bernegara kita

## H. HIDAYATULLAH, S.E

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (20/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah berpendangan bahwa konstitusionalitas Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 bermasalah.

“Dalam kondisi krisis berat seperti apapun belum ada preseden pemerintahan kita sebelumnya yang gunakan Perpres untuk Perubahan APBN. Ini baru pertama terjadi dalam sejarah kita, Perubahan APBN hanya diatur dalam Perpres. Ini meyalahi tradisi dan konstitusi bernegara kita. Berbagai negara juga sama, kebijakan fiskal atau belanja negara sebesar apapun untuk menghadapi Pandemi

Covid-19 ini, pihak eksekutif selalu melibatkan parlemen”, jelasnya menanggapi perkembangan yang ada.

Legislator asal Sumatera Utara ini juga menekankan bahwa di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, masalah APBN telah diatur dengan sangat rinci dan jelas serta tercantum pada Bab VIII UUD NRI Tahun 1945, tentang Hal Keuangan Pasal 23. Pasal 23 terdiri dari tiga ayat, yaitu: (1) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) RUU APBN

diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD; (3) Apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu.

“Penetapan Perubahan APBN dengan Peraturan Presiden (Perpres) jelas bertentangan dengan Pasal 23 UUD NRI 1945. Ini tidak sesuai dengan pasal tersebut. Paling tidak harusnya Perubahan APBN, walaupun sangat-sangat terpaksa pemerintah bisa gunakan peraturan perundang-undangan sederajat seperti Perppu. Kalau Perpres tidak sepadan dengan yang dimaksud UUD NRI 1945”, tegasnya.

Hidayatullah menilai kalau Perubahan APBN ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan sederajat atau Perppu maka Presiden akan tetap melibatkan DPR dengan pertimbangan DPD untuk melakukan pembahasan Perubahan APBN. Meski proses pemba-hasannya terbatas, pilihannya menolak atau menerima Perppu tersebut.

Menurutnya, seluruh Presiden Republik Indonesia



dalam memimpin pemerintahan sejak Presiden Soekarno (di akhir Orde Lama), kemudian Presiden Suharto (selama masa Orde Baru), Presiden BJ. Habibie (di akhir Orde Baru), juga Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati, serta Presiden SBY, selalu menetapkan APBN setiap tahun dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan sederajat (Perppu), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945. Bahkan ketika Indonesia menghadapi krisis yang sangat berat.

Akibat penggunaan per-

pres yang menyebabkan hilangnya eksistensi lembaga perwakilan rakyat, akan mendorong rakyat turun ke jalan

“Negara kita dari awal berdiri sampai sekarang sudah pernah melewati berbagai krisis dan masalah yang berat. Tetapi para pemimpin kita sebelumnya selalu menjaga proses APBN tetap sesuai konstitusi. Hari ini kita menghadapi kenyataan yang buruk ketika Perubahan APBN hanya diatur dalam Perpres. Penghormatan antar lembaga negara juga menjadi meredup. Ini mengkhawatirkan”, pungkasnya.

## Stimulus Ratusan Triliun Tak Terlihat Dalam APBN-P 2020

# Pemerintah Harus Terbuka

Yang terlihat kenaikan defisit menjadi Rp 852,9 triliun bukan karena stimulus untuk penanganan pandemi Covid-19. Tetapi sebagian besar untuk mengkompensasi penerimaan negara terutama pajak yang turun. Jadi Perubahan APBN 2020 tidak terlihat untuk kepentingan penanganan wabah.

### H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (23/04) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam mendesak pemerintah untuk lebih terbuka terkait Perubahan APBN 2020.

"Kita ingin kejelasan alokasi anggaran untuk pencegahan meluasnya wabah dan dukungan atas dampak ekonomi yang dihadapi rakyat kecil. Dimana posisi anggaran Rp 405,1 triliun yang diumumkan pemerintah. Kita tidak mendapat informasi yang cukup dalam Perpres 54 tentang Perubahan APBN 2020. Informasi yang terkandung didalamnya sangat terbatas. Ini jauh berbeda dibandingkan muatan dalam UU APBN Perubahan biasanya yang jauh lebih transparan dan jelas", paparnya merespon

perkembangan.

Anggota Komisi XI DPR RI mempertanyakan paket stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah pada 31 Maret 2020 yang tidak terlihat dalam Perpres 54 tentang Perubahan APBN 2020. Paket stimulus yang dijanjikan sebesar Rp405,1 triliun untuk sektor kesehatan Rp75 triliun, perlindungan sosial Rp110 triliun, insentif perpajakan Rp70,1 triliun, dan bantuan kepada dunia usaha Rp150 triliun. Dari data Perubahan APBN 2020, anggaran belanja negara hanya naik Rp73,4 triliun saja. Dengan perincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) naik Rp167,6 triliun, dan anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

(TKDD) turun Rp94,2 triliun.

"Meskipun belanja pemerintah pusat naik, tetapi anggaran beberapa kementerian terkait malah turun dan ada yang hanya naik sedikit. Misalnya anggaran Kementerian Sosial turun dari Rp62,8 triliun menjadi Rp60,7 triliun. Ini menjadi pertanyaan publik dimana ditaruhnya tambahan untuk perlindungan sosial yang Rp110 triliun yang telah diumumkan?", tandasnya.

Demikian juga Anggaran belanja Kementerian Kesehatan hanya naik Rp19,1 triliun, dari Rp57,4 triliun menjadi Rp76,5 triliun. Sedangkan menurut paket stimulus, sektor kesehatan dapat anggaran tambahan Rp75 triliun.

"Kalau begitu, sisanya Rp 55,9 triliun ditaruh dimana? Publik bertanya dimana tambahan untuk sektor kesehatan Rp75 triliun? Anggaran terkait kesehatan ini harus jelas. Sehingga tidak boleh ada kekurangan fasilitas dan alat kesehatan seperti masker, alat pelindung diri, ventilator dan lainnya dilapangan", imbuhnya.

Ecky kecewa atas kurang terbukanya informasi Perubahan APBN 2020 sehingga anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar



Rp405,1 triliun tidak terlihat oleh publik. Bahkan yang terlihat mencolok terkait defisit anggaran yang melonjak Rp545,7 triliun, dari defisit Rp307,2 triliun menjadi defisit Rp852,9 triliun. Tetapi lonjakan defisit tersebut dominan untuk mengkompensasi penerimaan negara yang turun Rp472,3 triliun, dari Rp2.233,2 triliun menjadi Rp1.760,9 triliun.

Sedangkan anggaran belanja hanya naik Rp73,4 triliun. Memang ada kenaikan signifikan pada pos Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp 240 triliun, tetapi ini juga tidak dijelaskan lebih detail untuk apa. Karena dalam rekening ini juga terkait pembayaran bunga utang yang juga pasti akan melonjak dengan tambahan

pembiayaan yang melonjak.

"Karena tidak transparan informasi dalam Perubahan APBN 2020, sehingga yang ditangkap publik, tambahan defisit Rp545,7 triliun karena turunnya penerimaan negara Rp472,3 triliun ditambah tambahan anggaran belanja yang hanya Rp73,4 triliun," pungkasnya.

Dengan begitu, lanjut Ecky, yang terlihat kenaikan defisit menjadi Rp852,9 triliun bukan karena stimulus untuk penanganan pandemi Covid-19. Tetapi sebagian besar untuk mengkompensasi penerimaan negara terutama pajak yang turun.

Selengkapnya di [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)

# Akibat Covid-19 Harga Pangan Melangit, PKS Pertanyakan Peran Pemerintah

"Di tengah pandemi covid-19, level inflasi tersebut sudah sangat berbahaya bagi golongan menengah ke bawah. Untuk itu pemerintah agar lebih berperan baik dari segi ketersediaan stok pangan, proses distribusi dan menjaga kestabilan harga. Apalagi beberapa hari kedepan umat muslim akan memasuki bulan ramadhan,"

**Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M**

Anggota Komisi XI DPR RI

Lampung (22/04) — Dampak covid-19 terus menggerogoti ekonomi nasional, lihat saja PHK pekerja paling nyata dan terasa. PHK terjadi karena beberapa perusahaan sudah tidak berproduksi. Disamping itu pelaku sektor informal tidak leluasa beraktivitas menyebabkan kelumpuhan, penting perhatian pemerintah agar kondisi tidak semakin memburuk.

Selain PHK, tekanan terjadi juga pada kenaikan harga pangan yang tentunya membebankan masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, inflasi bahan makan mencapai 6,41 persen (yoy) pada Maret 2020.

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menjelaskan inflasi 6 persen sangat tinggi dan mengganggu, apalagi situasi ekonomi rumah tangga berada di titik terendah.

Aleg Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa harga rata-rata harian cabai rawit merah per kg selama April naik hingga 25 persen dibanding bulan Maret sedangkan gula pasir, bawang merah, rata-rata naik hampir 15

persen. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, harga cabai rawit sudah naik 35 persen pada April, gula pasir melambung hingga 37 persen.

"Di tengah pandemi covid-19, level inflasi tersebut sudah sangat berbahaya bagi golongan menengah ke bawah. Untuk itu pemerintah agar lebih berperan baik dari segi ketersediaan stok pangan, proses distribusi dan menjaga kestabilan harga. Apalagi beberapa hari kedepan umat muslim akan memasuki bulan ramadhan," tutup Junaidi.



## Sumber APBN Melebihi Hutang

# Banggar DPR: Pemerintah Bahayakan Ekonomi Nasional

“Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah selama ini jika terjadi defisit anggaran maka pemerintah memilih langkah yang mudah yaitu berhutang untuk menutupinya. Padahal tahun ini saja pemerintah harus membayar cicilan pokok hutang luar negeri sebesar Rp 105 triliun

## H. SUKAMTA, Ph.D.

Anggota Banggar DPR RI

Jakarta (23/04) — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta menyatakan bahwa banyak terjadi keanehan dalam anggaran perubahan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020.

Awalnya menurut Sukamta, APBN 2020 sejumlah Rp 2.540 triliun kemudian terjadi penambahan belanja sebesar Rp 73 triliun sehingga APBN menjadi Rp 2.613 Triliun, padahal rencana pendapatan turun tajam dari Rp 2.233 Triliun menjadi Rp 1.760 Triliun.

“Ini kesannya ugal-ugalan

dalam pengelolaan keuangan negara, mestinya yang dilakukan adalah melakukan penghematan belanja dan merekolasi sejumlah anggaran pada pos-pos yang tidak mendesak. Karena cara berpikirnya seperti ini peningkatan defisit APBN melonjak dari Rp 397 triliun atau 1.76 persen dari PDB menjadi Rp 852 triliun 5,07 persen dari PDB,” pungkasnya.

Sukamta menambahkan, defisit anggaran bisa saja semakin besar sampai 10-15% jika tidak ada penghematan dan terus terjadi penambahan belanja negara sementara

penerimaan negara semakin menurun akibat krisis ekonomi.

Hal ini, kata Sukamta, dimungkinkan karena di dalam Perppu nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan tidak diatur batas maksimal defisit anggaran. Aturan tanpa pembatasan defisit ini bisa membahayakan ekonomi nasional.

“Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah selama ini jika terjadi defisit anggaran maka pemerintah memilih langkah yang mudah yaitu berhutang untuk menutupinya. Padahal tahun ini saja pemerintah harus membayar cicilan pokok hutang luar negeri sebesar Rp 105 triliun,” tutur anggota Banggar DPR RI ini.

Pada awalnya, kata Sukamta, APBN 2020 pembiayaan anggaran dari hutang sebesar Rp 351 triliun membengkak 3 kali lipat



menjadi Rp 1.006 triliun. Penambahan pembiayaan dari hutang membuat ruang fiskal Indonesia semakin terbatas ke depannya karena hutang semakin menumpuk akibatnya pemerintah akan kesulitan likuiditas. Hutang yang semakin besar dan bertelon panjang akan membebani generasi yang akan datang.

“Pemerintah Jokowi-Ma’ruf yang menikmati belanjanya namun generasi anak cucu bangsa Indonesia yang menanggung pengembaliannya hutang. Parahnya lagi selama ini pemerintah tidak mampu menjelaskan bagaimana hutang ini dikelola untuk kegiatan modal produktif akibat tidak

jelas alokasinya yang turun secara gelondongan. Hutang menjadi modal produktif ataukah hanya konsumtif masih jadi pekerjaan rumah pemerintah,” papar anggota DPR RI Dapil DIY dalam keterangan tertulis Senin, (20/4).

Perppu 1/2020 Mengakali Defisit Anggaran Negara

Sukamta mengingatkan per Maret 2020 telah terjadi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp76,4 triliun akibat dari realisasi pendapatan negara lebih rendah belanja negara.

Selengkapnya di fraksi.pks.id



**H. Ahmad Syaikhul**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VII

## **Ahmad Syaikhul Salurkan 20 Ton Beras di Bekasi, Karawang dan Purwakarta**

*Situasi saat ini, memerlukan kepedulian semua pihak. Banyak karyawan di PHK, pengangguran di mana-mana, dan ancaman krisis pangan menghantui. Jika kondisi ini berkepanjangan, krisis pangan di depan mata kita. Karena itu semua pihak harus peduli*

# Ahmad Syaikhul Salurkan 20 Ton Beras di Bekasi, Karawang dan Purwakarta

Situasi saat ini, memerlukan kepedulian semua pihak. Banyak karyawan di PHK, pengangguran di mana-mana, dan ancaman krisis pangan menghantui. Jika kondisi ini berkepanjangan, krisis pangan di depan mata kita. Karena itu semua pihak harus peduli

## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VII

Bekasi (25/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Ahmad Syaikhul salurkan 20 ton beras kepada warga terdampak Covid-19 di Kota dan Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta, Sabtu, (25/04).

Menurut Syaikhul, program ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat. Sebab, selama pandemi Corona ini, banyak yang terdampak secara ekonomi.

"Bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat. Karena dampak

ekonomi wabah Corona ini sangat luar biasa," ujar Syaikhul.

Situasi saat ini, lanjut Syaikhul, memerlukan kepedulian semua pihak. Banyak karyawan di PHK, pengangguran di mana-mana, dan ancaman krisis pangan menghantui.

"Jika kondisi ini berkepanjangan, krisis pangan di depan mata kita. Karena itu semua pihak harus peduli," tegas Syaikhul.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu juga mengajak semua pihak yang Allah berikan

kelebihan rezeki untuk ikut membantu. Ini saatnya semua pihak bergandengan tangan.

"Saya juga mengajak semua pihak untuk ikut membantu meringankan masyarakat. Kita harus bergandengan tangan di situasi krisis seperti ini," pungkas Syaikhul.



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



Marhaban Ya.. *رمضان* 1441 H  
**Ramadhan**

**Membangun Kebersamaan  
untuk Mengatasi Persoalan-  
Persoalan Bangsa**

*Ayo Lebih Baik*

**Habib Aboe Bakar Alhabsyi**

Bendahara Fraksi PKS DPR RI

# Aleg PKS Secara Bertahap Berbagi Alat Kesehatan ke Puskesmas dan RS

Ini adalah kali ketiga kami berbagi alat kesehatan untuk rumah sakit dan puskesmas di berbagai kecamatan berbeda. Kami sadar kemampuan kami terbatas, tapi kami terus berusaha semaksimal mungkin dapat menyalurkan bantuan secara bertahap dan berkesinambungan

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si.,M.Psi.T**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar I

Bandung (22/04) — Beberapa Puskesmas dan RSUD di Kota Bandung dan Kota Cimahi akhir pekan ini mendapat bantuan alat kesehatan dari aleg DPR RI dapil Kota Bandung dan Cimahi, Ledia Hanifa Amaliah.

“Kita sama mengetahui bahwa para tenaga kesehatan, sebagai ujung tombak penanganan covid-19 berhadapan langsung dengan resiko tertinggi penularan penyakit. Sementara alat bantu kesehatan semakin terbatas, mahal dan sulit didapatkan.

Makanya kami pada kundapil pekan ini kembali fokus memberikan bantuan alat kesehatan pada beberapa puskesmas dan rumah sakit,” jelas Ledia

Pada agenda kundapil akhir pekan lalu, 18-19 April, tercatat ada 2 rumah sakit dan 4 puskesmas yang mendapat bantuan. RSUD Cibabat di Kota Cimahi, RS Muhammadiyah di Kota Bandung, serta puskesmas di Kecamatan Pasirlyang, Babatan, Kopo dan Cijagra Lama yang semua

berada di Kota Bandung.

“Ini adalah kali ketiga kami berbagi alat kesehatan untuk rumah sakit dan puskesmas di berbagai kecamatan berbeda. Kami sadar kemampuan kami terbatas, tapi kami terus berusaha semaksimal mungkin dapat menyalurkan bantuan secara bertahap dan berkesinambungan. Harapannya tentu bisa menjangkau lebih banyak rumah sakit dan puskesmas, sedikit demi sedikit, ngeureuyeuh kalo kata orang sunda mah,” tambah Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini pula.

Paket bantuan bagi RS yang dikirimkan Ledia terdiri atas 10 baju APD, 200 Masker N95, 500 masker biasa dan 5 liter hand sanitizer. Sementara paket untuk puskesmas terdiri atas masker biasa 300 pcs, 2 baju APD, 1 liter hand sanitizer, 1 box vitamin dan 10 pasang hand gloves.

Kunjungan ke daerah pemilihan adalah salah satu tugas kedewanan yang harus dilaksanakan setiap anggota



DPR RI. Namun karena saat ini tidak memungkinkan untuk mengumpulkan sejumlah orang dalam kegiatan advokasi, sosialisasi maupun serap aspirasi kepada masyarakat di daerah pemilihan maka menyampaikan bantuan kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19 menjadi salah satu pilihan kegiatan.

“Kita sesuaikan apa kebutuhan masyarakat dengan kemampuan kita. Secara umum masyarakat membutuhkan bahan pangan dan bahan sanitasi maka kepada masyarakat kita berikan

bantuan bahan pangan dan bahan sanitasi tersebut. Sementara bagi rumah sakit dan klinik kesehatan prioritas utamanya adalah alat kesehatan pendukung kerja mereka, maka kami berikan apa-apa yang bisa membantu kerja para tenaga kesehatan ini. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu upaya negara dan juga ribuan lembaga, organisasi, komunitas dan orang-perorang lain yang juga tengah sama bergerak mengatasi dampak pandemik Covid-19 di negeri tercinta ini.”Tutup Ledia

Bagikan 1000 Paket Sembako

# Saadiah Peduli Warga Terdampak Covid 19 di Ambon

“Jaring pengaman social harus serius disiapkan serius oleh pemerintah. Aspek keterjangkauan harus dapat menyentuh masyarakat pada semua wilayah termasuk di wilayah 3T”

## SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

Ambon (21/04) — Kebijakan physical distancing dan mewabahnya covid 19 berdampak kepada masyarakat luas di Maluku. Daya beli sebagian besar masyarakat menjadi menurun dan beban ekonomi kian bertambah. Upaya meringankan beban masyarakat akibat pandemic Virus Corona (Covid 19) dilakukan oleh Anggota DPR RI Dapil Propinsi Maluku dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty.

Sejak kemarin (20/4) dan hari ini (21/4), Saadiah Uluputty menggelar aksi bagi sembako gratis kepada warga terdampak. Bersama struktur DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Propinsi Maluku, aksi bagi – bagi sembako dilakukan di kota Ambon. Pihaknya menyediakan

dan mendistribusikan 1000 paket sembako.

“Pandemi Covid 19 menyebabkan beban ekonomi warga kota Ambon terkhusus dan Maluku secara umum kena dampak. Daya beli mereka menurun. Banyak yang kehilangan mata pencaharian”, sebut Saadiah di Ambon, Selasa, (21/04).

Distribusi dan pembagian sembako gratis antara lain untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak dan rentan. Selain bantuan 1000 sembako, Saadiah juga menyiapkan 1000 buah masker yang dibagi bersamaan dengan paket sembako.

Bantuan yang disalurkan kata Saadiah, tidak dapat menyentuh seluruh masyarakat

di Kota Ambon dan daerah lainnya di Maluku, namun kontribusi yang dilakukan menjadi sumbangsih untuk membangun empati bagi masyarakat.

“Beban ekonomi yang dipikul oleh masyarakat tentu berat. Aksi peduli ini menjadi kontribusi untuk berbagi perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan”, jelas anggota Fraksi PKS ini.

Dirinya menandakan jika efek covid 19 memukul berbagai sektor kehidupan masyarakat. Maka ia berharap agar pemerintah menyiapkan jaring pengaman sosial (social safety net) secara serius. Semua wilayah harus tersentuh termasuk masyarakat di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) di Propinsi Maluku.

“Jaring pengaman sosial harus serius disiapkan serius oleh pemerintah. Aspek keterjangkauan harus dapat menyentuh masyarakat pada semua wilayah termasuk di wilayah 3T”, harap Saadiah.



## Tangani Masyarakat Terdampak Covid-19

# Salurkan Bantuan 10 Ton Beras

Masyarakat membutuhkan bantuan pangan secara cepat. Meskipun pemerintah memiliki data, bantuan yang bisa mereka berikan juga terbatas dan tidak mampu memenuhi secara keseluruhan. In shaa Allah, ini adalah bantuan tahap pertama dari kami. Rencananya, jika Allah memudahkan, kami akan lanjutkan bantuan tersebut hingga tahap selanjutnya”

### KH. BUKHORI, Lc., M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jateng I

Jakarta (21/04) — Berdasarkan basis data kesejahteraan sosial terdapat sekitar 99 juta jiwa penduduk rentan miskin di Indonesia. Kelompok ini merupakan segmen masyarakat yang paling terdampak akibat Covid-19. Selain itu, dari jumlah tersebut terdapat sekitar 40 juta warga yang terdampak paling serius secara sosial ekonomi. Segmen masyarakat ini rata-rata bekerja di sektor informal misalnya pedagang, sopir angkot, kuli bangunan, pengemudi ojol dan sebagainya.

Anggota komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, bahkan mengungkapkan dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia sekitar 60

juta penduduk mengalami kesulitan untuk menyiapkan bahan pangan harian.

“Sekitar 60 juta penduduk Indonesia mengalami kesulitan untuk makan sehari-hari selama pandemi. Di samping itu, 20% dari jumlah tersebut ada masyarakat yang hanya memiliki persediaan bahan pangan untuk sekitar 1-4 pekan saja. Sebab itu, mereka perlu mendapat perhatian serius” ungkap Bukhori ketika menyerahkan bantuan logistik di kantor DPW PKS Jawa Tengah, Senin (20/04/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Bukhori menyumbangkan bantuan

sebanyak 10 ton beras untuk disalurkan di masing-masing dapil (Kab. Semarang, Kendal, Kota Semarang, dan Salatiga). Selain itu, 1000 paket sembako juga telah disalurkan dengan rincian 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 kg gula, dan 30 bungkus mie instan per paket. Distribusi bantuan logistik tersebut dilakukan oleh tim yg terdiri dari DPD PKS di masing-masing dapil dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Peningkatan  
Angka Kemiskinan

Bukhori memprediksi terjadinya peningkatan angka PKH (Program Keluarga Harapan) di dapilnya tersebut. Misalnya di Salatiga, jumlah PKH berkisar di angka 6 ribu jiwa sebelum terjadi wabah, tetapi setelah terjadinya wabah diprediksi akan ada lonjakan angka pada kisaran 17 ribu jiwa. Sedangkan untuk Kota Semarang diprediksi akan ada peningkatan drastis jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Di dapil kami sendiri, perkiraan kami akan terjadi peningkatan sebesar 3-5 kali lipat jumlah masyarakat rentan miskin. Kendati belum diperoleh angka statistik yang pasti, kami telah



melakukan pemetaan bersama tim di wilayah” jelas Bukhori.

Bantuan logistik tersebut diproyeksikan kepada masyarakat akar rumput termasuk kader PKS yang turut terdampak secara sosial akibat wabah ini. Sasaran bantuan ini ditujukan kepada dua lapisan masyarakat. Lapisan pertama adalah masyarakat yang tidak memiliki bahan pangan untuk makan sehari-hari. Lapisan kedua adalah masyarakat yang tinggal memiliki persediaan

pangan untuk satu sampai empat pekan ke depan.

“Masyarakat membutuhkan bantuan pangan secara cepat. Meskipun pemerintah memiliki data, bantuan yang bisa mereka berikan juga terbatas dan tidak mampu memenuhi secara keseluruhan. In shaa Allah, ini adalah bantuan tahap pertama dari kami. Rencananya, jika Allah memudahkan, kami akan lanjutkan bantuan tersebut hingga tahap selanjutnya” pungkaskan Bukhori.

## Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

# Rofik Sumbang 2.000 Paket Sembako

“Sesuai dengan amanah presiden partai dan fraksi PKS, Semua anggota DPR RI PKS diminta untuk terlibat dan berperan aktif dalam mengatasi wabah virus corona ini dalam berbagai bentuk dalam rangka meringankan beban masyarakat

### H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

Purbalingga (20/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah VII, Rofik Hananto, kembali menunjukkan kepeduliannya sebagai wakil rakyat, setelah sempat melakukan rangkaian kegiatan sosial dalam rangka penanganan wabah virus corona, kali ini rofik menyumbang 2.000 paket sembako.

2000 paket sembako ini akan didistribusikan ke masyarakat terdampak di 3 Kabupaten, meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Rofik mengatakan bahwa ini adalah upaya kami di PKS untuk berperan aktif membantu masyarakat terdampak Covid-

19. “Sesuai dengan amanah presiden partai dan fraksi PKS, Semua anggota DPR RI PKS diminta untuk terlibat dan berperan aktif dalam mengatasi wabah virus corona ini dalam berbagai bentuk dalam rangka meringankan beban masyarakat,” kata Rofik.

Rofik menambahkan pemberian paket sembako ini menjadi bukti nyata bahwa partai ini benar-benar hadir dan konsisten memperhatikan kondisi masyarakat, dan dapat meringankan beban masyarakat.

Bantuan paket sembako didistribusikan ke Pengurus DPD dan relawan SEMAR yang

selanjutnya akan disalurkan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Rofik juga mengajak semua pihak untuk terlibat dalam penanganan wabah corona ini.

“Saya mengajak semua pihak untuk terlibat dalam penanganan wabah corona ini, dengan peran semua pihak saya yakin kita dapat segera mengatasi pandemi ini.” ungkapnya.

Hadir dalam kesempatan ini, H. Karsono, S.Pd (Ketua DD Jawa Tengah X), Cahyo Susilo (Ketua DPD PKS Purbalingga), Broto Agung S. (Ketua DPD PKS Banjarnegara) dan Pramono (Sekretaris DPD PKS Kebumen) Ketua DPD PKS Purbalingga, Cahyo Susilo mengatakan dampak wabah corona ini sudah sangat terasa terhadap Ketahanan Pangan dan Ekonomi masyarakat.

“Insyallah bantuan ini akan meringankan masyarakat terdampak, walaupun belum bisa menjangkau keseluruhan masyarakat. Kita akan berupaya untuk memastikan agar bantuan ini benar-benar sampai



ke masyarakat yang terdampak yang benar-benar membutuhkan.” paparnya.

“Atas nama Pengurus DPD PKS, saya mengucapkan Jazakumullah khair kepada

Ustadz Rofik dan Keluarga, Insyallah bantuan ini menjadi bantuan yang sangat berarti dan menjadi berkah untuk semua.” imbuh Cahyo.

# Untuk Keselamatan Bersama, Netty Minta Perantau Cirebon Indramayu Jangan mudik

Pemerintah Cirebon melaporkan sampai saat ini sudah lebih dari 35.000 pemudik tiba di Cirebon. Bayangkan, jika jumlah sebanyak itu dianggap sebagai ODP, menjadi *carrier* atau naik status menjadi PDP? Ini berbahaya dan patut menjadi perhatian bersama

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VIII

Jakarta (26/04) — Pemerintah melarang masyarakat mudik lebaran, terutama dari dan ke wilayah zona merah Covid-19.

Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta hal yang sama usai menjadi narasumber dalam Diskusi Webiner bertajuk Pemberdayaan Perempuan di Masa Pandemi yang diselenggarakan oleh PAHAM Indonesia, Minggu (27/04).

"Perantau asal Cirebon dan Indramayu yang tersebar di zona merah Covid-19 seperti

Jabodetabek dan kota besar lainnya untuk tidak mudik lebaran. Kalau cinta pada keluarga di rumah, pulangnyanya nanti setelah kondisi aman," ujar Netty.

Wakil Ketua FPKS ini menambahkan perantau asal Cirebon Indramayu bekerja di sektor formal maupun informal seperti UMKM, jasa, kuliner sampai industri.

"Kemudahan akses transportasi melalui tol Cipali membuat mobilitas penduduk tinggi," jelas Netty.

Pemerintah Cirebon melaporkan sampai saat ini sudah lebih dari 35.000 pemudik tiba di Cirebon.

"Bayangkan, jika jumlah sebanyak itu dianggap sebagai ODP, menjadi *carrier* atau naik status menjadi PDP? Ini berbahaya dan patut menjadi perhatian bersama," tutur anggota komisi IX DPR RI.

Data terbaru tercatat per 23 April, kota Cirebon 316 ODP, 8 PDP, 4 positif dengan 1 meninggal dunia. Kabupaten Cirebon ODP 157 dengan 3 meninggal dunia, PDP 42 dengan 8 meninggal dunia, positif 6 dengan 2 meninggal dunia. Sedangkan kabupaten Indramayu 637 ODP, 71 PDP dengan 21 meninggal dunia negatif, positif 2.

Melihat grafik yang makin meningkat, Netty juga meminta masyarakat jujur saat berhadapan dengan petugas kesehatan.

"Sampaikan apa adanya, jangan menipu kebenaran. Kita belajar dari kasus diisolasinya 21 tenaga kesehatan RS Cirebon akibat



pasien dan keluarga pasien yang tidak jujur saat berobat akibat sesak nafas setelah sebelumnya kontak fisik dengan mayat pasien positif Covid-19," katanya.

Sebelum mengakhiri, legislator dapil Jabar VIII ini mengingatkan, warga Cirebon dan Indramayu memiliki kerentanan kondisi yang dapat memperparah paparan Covid-19.

"Misalnya, cukup banyak

penduduk berusia lanjut, kesadaran warga akan pentingnya kebersihan, kesehatan dan sanitasi lingkungan masih harus ditingkatkan dan Cirebon pun termasuk wilayah dengan tingkat penyebaran TBC dan DBD cukup tinggi. Kondisi ini menjadi faktor yang dapat memicu penyebaran Covid-19 jika banyak pemudik masuk ke Cirebon," tutup Netty.

# Sakinah Aljufri Bimbing Mualaf Lafalkan Dua Kalimat Syahadat

Tidak boleh putus hubungan dengan orang tua. Nanti Allah akan limpahkan keberkahan, ditambah rizkinya diberikan macam-macam jalan oleh Allah untuk anda dan jangan putus mendoakan orang tua

## Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulteng

Palu (26/04) — Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS dapil Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri dihadapan tokoh agama dan teman-teman Irma, membimbing Irma mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai tanda dirinya telah memeluk agama Islam Kamis, (23/04/2020) malam di komplek Al-Khairaat.

“Yang terpenting Irma masuk Islam bukan keterpaksaan, panggilan itu namanya hidayah petunjuk dari Allah, tidak semua orang menerima petunjuk, tidak semua orang menerima hidayah, jadi adik harus bersyukur karena dapat hidayah, cahaya penerang ilahi” tutur

Anggota dewan asal Sulawesi Tengah.

Sakinah pun berpesan agar niat untuk menjadi seorang muslimah secara totalitas dan menjalankan ajaran islam dengan benar bukan masuk islam asal-asal saja, dan tidak menoleh kebelakang karena kita sudah cinta islam dengan benar dan jangan ogah-ogahan, masuk islam bukan karena seseorang, tapi karena Allah SWT.

Sakinah pun berpesan kepada Irma karena masih ada orang tua, berdoa minta kepada Allah mudah-mudahan hidayah ini juga didapatkan kedua orang tuanya, keluarganya bisa

merasakan nikmatnya islam.

“Hubungan baik kepada kedua orang tua jangan putus itu kewajiban, terus intens komunikasi bahkan kalau dulu tidak perhatian, jarang telp orang tua, sekarang harus sering telp orang tua. Tidak boleh putus hubungan dengan orang tua. Nanti Allah akan limpahkan keberkahan, ditambah rizkinya diberikan macam-macam jalan oleh Allah untuk anda dan jangan putus mendoakan orang tua,” pesan Sakinah.

Sementara Irma sendiri mengaku, bahwa dirinya tertarik memeluk Islam karena beberapa bulan lalu penasaran dengan Islam hingga dia mencari tahu dan memberanikan diri untuk sebelum waktu puasa agar dia bisa berpuasa secara penuh sambil mendalami Islam di bulan Ramadhan.

“Setelah saya mengucapkan itu tambah damai saya rasakan,” ujar Irma.



# Junaidi Auly Kembali Salurkan APD ke Fasilitas Kesehatan di Lampung

Kami menerima aspirasi dari beberapa Rumah Sakit di dapil dan langsung menyerahkan bantuan berupa Alkes, harapannya semoga bermanfaat khususnya untuk tenaga kesehatan

**Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Lampung II

Lampung (25/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II Junaidi Auly kembali menyalurkan bantuan ke 11 rumah sakit yang ada di Lampung demi melawan wabah covid-19.

"Kami menerima aspirasi dari beberapa Rumah Sakit di dapil dan langsung menyerahkan bantuan berupa Alkes, harapannya semoga bermanfaat khususnya untuk tenaga kesehatan", ungkap Junaidi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (25/04)

Bantuan yang diberikan oleh Junaidi diantaranya yaitu Alat Pelindung Diri (APD) 250 set, 12.000 buah masker kain, 3.250 buah masker medis,

3.200 botol hand sanitizer, 1.200 botol strong acid, 15 liter biang disinfektan dan 10 buah Alat semprot disinfektan.

Legislator PKS ini menyebutkan ada 11 lokasi yang kami salurkan bantuan tersebut, diantaranya RS Abdul Moeloek Bandar Lampung yang menjadi RS rujukan covid-19 di Provinsi Lampung, RS Hi. Kamino Way Kanan, RS Handayani dan Dinas Kesehatan Lampung Utara, RSUD Sukadana Lampung Timur, RSUD Tulang Bawang Barat, RSUD Menggala Tulang Bawang, Klinik Rawat Inap Darussyifa Way Pengubuan dan RS Islam Asy Syifa Bandar Jaya Lampung Tengah, Puskesmas

Mesuji, RSJ Lampung, dan RSU Al Fauzan di Jakarta.

Aleg Komisi XI DPR RI ini menjelaskan penyerahan bantuan merupakan wujud kepedulian terhadap tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanggulangan covid-19. Hal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang mewakili masyarakat Lampung khususnya dapil Lampung II.

Junaidi berharap dengan penyerahan bantuan ini bisa memberikan semangat dan rasa aman kepada tenaga kesehatan khususnya di Provinsi Lampung.



## Memasuki Ramadhan

# Uluputty Kembali Berbagi Dengan Warga Kurang Mampu

Kegiatan-kegiatan berbagi yang dilakukan olehnya maupun struktur dan kader PKS lainnya sebagai upaya memperkokoh misi PKS yakni "Berkhidmat Untuk Rakyat".

### SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

Ambon (25/04) — Memasuki bulan suci Ramadhan 1441 H, Anggota DPR RI Dapil Maluku dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty kembali berbagi kasih dengan masyarakat. Kali ini, dilaksanakan di RT 01 RW 19 Desa Batumerah bekerjasama dengan pemuda di komplek setempat.

"Alhamdulillah. Kegiatan pembagian sembako dan masker bisa terlaksana. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu Saadiah dan PKS," kata Muhammad Rama Hanubun, Koordinator Pelaksana Rabu (22/04/2020).

Sementara itu, Saadiah

dalam kesempatan itu mengatakan, kegiatan berbagi dalam bentuk pembagian sembako dan masker yang dilakukan sebagai bagian dari empati kepada masyarakat kurang mampu menjelang ramadhan.

"Menyambut bulan mulia ini, beta sudah niatkan untuk bantu masyarakat. Semoga sedikit bantuan ini bisa menambah keceriaan menyongsong ramadhan," kata Saadiah.

Menurut Saadiah, kegiatan-kegiatan berbagi yang dilakukan olehnya maupun struktur dan kader PKS lainnya

sebagai upaya memperkokoh misi PKS yakni "Berkhidmat Untuk Rakyat".

Lanjutnya, PKS di usia ke-22 tahun, akan terus hadir dalam kesulitan-kesulitan umat dan bangsa.

"PKS baru saja Ulang Tahun ke-22. Kami berkomitmen selalu hadir bersama rakyat," tegasnya.

Mantan Anggota DPRD Maluku dua periode itu juga mengajak masyarakat yang hadir untuk tetap sabar di tengah pandemi Covid-19.

"Virus Corona cukup berdampak. Mari kita bersabar dan berdoa agar Allah segera mengangkat virus ini," kata Saadiah.

Untuk diketahui, kegiatan berbagi legislator Maluku tersebut dilakukan setelah sebelumnya melakukan kegiatan yang sama di Milad PKS dan Hari Kartini.



Bayi di Kabupaten Tegal Positif Covid-19,

# Fikri: Patuhi Larangan Mudik

"Ini menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa virus ini menyerang tidak mengenal usia. Kepada semua pihak, baik tua maupun muda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Termasuk yang terbaru, larangan mudik

**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah

Kabupaten Tegal (23/04) — Anggota DPR RI asal Kabupaten Tegal Jawa Tengah dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih prihatin, ada bayi berusia Sembilan bulan yang menjadi pasien termuda sejauh ini yang didiagnosis positif terpapar virus Covid-19.

"Ini menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa virus ini menyerang tidak mengenal usia," kata Fikri saat dihubungi dari kediamannya, Selasa (21/04/2020).

Fikri meminta semua pihak, baik tua maupun muda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. "Termasuk yang terbaru, larangan mudik," kata Fikri.

Dirinya mengingatkan soal ketentuan terbaru yang baru dirilis istana, merupakan bagian dari upaya menghambat penyebaran pandemi Covid dari zona merah ke wilayah lain di Indonesia, terutama ketika musim mudik tiba.

Ia menyontohkan kasus positif Covid 19 yang menimpa seorang bayi lak-laki berusia Sembilan bulan asal desa Kertaharja, Kecamatan Pagarbarang, Kabupaten Tegal. Bayi tersebut diduga ditularkan dari ayah dan pamannya yang diketahui baru saja pulang dari Bekasi dan Tangerang.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeselo Slawi, dr. Guntur

Muhammad Taqwin mengungkapkan kondisi terkini dari bayi tersebut.

"Terpantau kondisi kesehatannya membaik," ujar dia usai menerima bantuan alat perlindungan diri (APD) dari Anggota DPR RI, Abdul Fikri Faqih.

Meski memperlihatkan kesehatan yang stabil namun tenaga medis rumah sakit yang berada di kawasan Slawi ini tetap menerapkan standar penanganan Covid-19. Termasuk melakukan uji lendir tenggorok yang kedua guna mengetahui hasil perawatan.

"Dalam beberapa hari mendatang akan kami lakukan uji swab ulang," tutur dr. Guntur.



## Kunjungan Dapil di Depok

# Aleg PKS Bagikan Sembako ke Warga Terdampak Covid

Selain ikhtiar yang sudah dijalani mari kita semua berdo'a semoga Wabah Virus Corona ini segera berlalu sehingga masyarakat dapat beraktifitas kembali seperti semula,

### Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VI

Depok (27/04) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Barat VI (Depok-Bekasi) Nur Azizah Tamhid, mendistribusikan Paket Sembako ke berbagai Komunitas Warga yang terdampak Covid - 19, Sabtu, (25/04/2020).

Dalam kesempatan tersebut Nur Azizah menyampaikan apa yang dilakukannya sebagai wujud kepedulian sebagai wakil rakyat terhadap kondisi masyarakat.

"Saat ini dengan mewabahnya Covid-19,

beberapa masyarakat sedang

mengalami beban hidupnya semakin berat," ungkapnya.

Nur Azizah menambahkan, dengan gotong royong dan bahu membahu maka dalam mengatasi pandemik ini maka beban akan berkurang dan akan lebih cepat teratasi.

"Selain ikhtiar yang sudah dijalani mari kita semua berdo'a semoga Wabah Virus Corona ini segera berlalu sehingga masyarakat dapat beraktifitas kembali seperti semula," harap Nur Azizah Tamhid mengakhiri.



## PROFIL

## TEDDY SETIADI, S.Sos



# RAMADHAN

## Saatnya Menebar Manfaat & Kebajikan

**P**ekan ini dalam program #keluargaPKS kita akan berkenalan dengan Anggota Fraksi PKS DPR RI asal Jawa Barat, tepatnya daerah pemilihan Jabar I yang terdiri dari Kota Bandung dan Kota Cimahi. Namanya Teddy Setiadi, S. Sos, Alumni Universitas Padjajaran Jurusan komunikasi. Weits siapa ini yang satu alama-ter coba cung? Akur berarti. Biasa dipanggil kang Teddy, lahir dan besar di Kota Bandung.

Dalam torehan hidupnya,

Kang Teddy menikah tidak dengan anak FIKOM, tapi anak Kedokteran yaitu DR. Enny Rohmawaty, dr. M. Kes. Alhamdulillah dikaruniai putra dan putri yang cerdas, yaitu Aisyah Nailah, Hamzah Imam Mujahid, Hasan Sayyid Syuhada dan Muhammad Izzuddin.

Kang Teddy mengawali diri sebagai aktivis masjid, kemudian bertransformasi menjadi politisi PKS dari awal berdirinya partai tersebut. Periode 2009 – 2019 menjadi Anggota DPRD

Kota Bandung Fraksi PKS Jabatan yang diemban ketika itu adalah Wakil Ketua DPRD dan Ketua Badan Pembentukan PERDA DPRD Kota Bandung. Saat ini selain menjadi Anggota DPR RI komisi II, juga tetap meneruskan aktivitas sebagai Dosen Politeknik Al Islam Bandung.

Pesan kang teddy untuk keluarga Indonesia: "Tetap sabar dan semangat di masa Covid 19. isi hari hari Ramadhan dengan ibadah dan kebajikan serta tebar keman-

faatan bagi sesama....

### SOCMED

Untuk mengetahui sepak terjang Teddy Setiadi, S. Sos dapat mengikuti social media:

Instagram : @kangteddy.setiadi  
Website Fraksi PKS DPR RI : <https://fraksi.pks.id/2019/11/07/anggota-dpr-ri-teddy-setiadi-s-i-kom/>



Tetap sabar dan semangat di masa Covid 19. Isi hari hari Ramadhan dengan ibadah dan kebajikan serta tebar kemanfaatan bagi sesama

*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*





Ketahui segala informasi  
terkini ikhtiar politik  
PKS di Parlemen

*Kunjungi*

# KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI



Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook  
Fraksi PKS DPR RI



Youtube  
PKSTV DPR RI

[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)